

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI TRADISI MATITI SUARA DI PURA BATUR DESA PAKRAMAN BATUR KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI



Direktorat
Udayana

23

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung



Pusat Kajian Bali
Universitas Udayana
Denpasar

360 19 2 2

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
MELALUI TRADISI MATITI SUARA DI PURA BATUR
DESA PAKRAMAN BATUR KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

**Prof. Dr. I.B. Gunada, M.Si.
Dr. Drs. Ida Bagus Rai Putra, M.Hum.
Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A
Drs. I Wayan Rupa, M.Si.
Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
I Wayan Rudita, S.Sos.
Kadek Budiarta**

**Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung**



**Pusat Kajian Bali
Universitas Udayana
Denpasar**

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI TRADISI MATITI SUARA
DI PURA BATUR DESA PAKRAMAN BATUR KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

Di susun oleh :

1. Prof. Dr. I.B. Gunada, M.Si.
2. Dr. Drs. Ida Bagus Rai Putra, M.Hum.
3. Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A.
4. Drs. I Wayan Rupa, M.Si.
5. Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum .
6. I Wayan Rudita, S. Sos.
7. Kadek Budiarta.
8. I Wayan Sukadia.

Editor : I Gusti Ngurah Jayanti, S.Sos, M.Si.

Desain Sampul : Hartono, S.S.

I Komang Purna Wiradnyana Putra, S.Kom.

Cetakan Pertama : 2012

Diterbitkan oleh : Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT)
Jalan Raya Dalung Abianbase no. 107 Kuta Utara, Badung, Bali
Telp. (0361) 439547, Fax (0361) 439546
Email :info@bpsntbali.com / bpnbbali@gmail.com
Web : bpsntbali.com
bekerjasama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana, ISI Denpasar,
dan UNHI Denpasar.

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa sepengetahuan dan izin dari penulis dan penerbit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72.

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum satu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada auyat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kata Pengantar

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT)

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya kegiatan Kajian Perlindungan Ekspresi Keragaman Budaya dan Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saya menyambut dengan senang hati dengan diterbitkannya buku hasil kajian dan inventarisasi para peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya bekerjasama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana serta beberapa sarjana dari perguruan tinggi di Denpasar dengan judul sebagai berikut:

1. Fungsi dan Makna Ritual Nampah Batu di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
2. Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tradisi Matiti Suara, di Pura Batur, Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
3. Roah Adat Ruwatan Cara Sasak, di Desa Loang Baloq, Kota Mataram.
4. Ritual Maulid Adat Masyarakat Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
5. Ritual Rebo Buntung di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
6. Upacara Gren Mahe (Penghormatan Leluhur) di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Upacara Pemanggilan Buaya di Kabupetan Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur
8. Ritual Wulla Poddu di Kampung Uumbu Koba, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
9. Makepung di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
10. Gendang Beleq di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
11. Wayang Menak Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
12. Kesenian Caci di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
13. Sasandu Alat Musik Tradisional Rote Ndao.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya buku hasil penelitian tersebut di atas diharapkan juga dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Walaupun usaha ini masih awal memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun paling tidak hasil terbitan ini dapat dipakai sebagai bahan refrensi maupun kajian lebih lanjut, guna menyelamatkan karya budaya yang hampir punah dan mengisi materi muatan lokal (mulok) di daerah dimana karya budaya ini hidup dan berkembang.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari tujuh ratus lebih suku bangsa dapat saling memahami kebudayaan yang hidup dan berkembang di tiap-tiap daerah maupun suku bangsa. Sehingga akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan APBNP tahun 2012 mulai dari Kajian Perlindungan Ekspresi Keragaman Budaya dan Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya sampai penerbitan buku ini.

Denpasar, Desember 2012
Kepala Balai,



Drs. I Made Purna, M.Si

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Keragaman ini selain merefleksikan keragaman etnisitas dan kelompok, juga merefleksikan kreativitas masyarakat Indonesia di dalam memproduksi dan mereproduksi budaya. Meskipun demikian, keragaman budaya itu belum semuanya teridentifikasi dan tertulis secara baik. Padahal, budaya itu merupakan bagian dari identitas dari berbagai kelompok yang ada di Indonesia. Konsekuensinya, banyak karya budaya yang seharusnya dijadikan acuan sebagai identitas untuk memperkuat jati diri dan pembentukan karakter bangsa yang masih terpelihara dikalangan masyarakat dan menjadi tradisi, akan tetapi belum direkam maupun dikaji secara mendalam.

Untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang dapat menjembatani pergaulan sosial dalam masyarakat beragam dengan latar belakang aneka ragam budaya itu tidaklah mudah. Kenyataan tersebut disadari sepenuhnya oleh para pendiri Negara Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 khususnya pasal 32 dan penjelasannya yang mengamanatkan ‘Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional (Indonesia)’. Adapun penjelasannya dengan tegas memberikan arah pengembangan sebagai berikut: ‘Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya’, termasuk ‘Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia’. Dari penjelasan itu kita bisa maklum betapa pentingnya arah pengembangan kebudayaan nasional dan apa pula landasannya.

‘Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya...’. Ini berarti bahwa Kebudayaan Nasional yang hendak dikembangkan harus benar-benar didukung dan dihayati oleh seluruh penduduk tanpa terkecuali. Oleh karena itu pula kebudayaan nasional haruslah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diterima penduduk Indonesia, bukan sekedar sebagai kerangka acuan, melainkan juga sebagai identitas untuk memperkuat jati diri, pembentukan karakter, dan memberikan kebanggaan secara nasional. Lebih lanjut, di dalam pasal 32 dijelaskan: ‘...kebudayaan lama dan asli terhitung sebagai kebudayaan bangsa...’. Dengan demikian Kebudayaan Nasional Indonesia benar-benar dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan sikap dan pola tingkah laku masyarakat pendukung dengan segala kebanggaan yang terkait.

Atas dasar penjelasan pasal 32 UUD 45, segala upaya untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta menyebarluaskan informasi kebudayaan di daerah-daerah perlu digalakan. Kalaupun tidak mencerminkan “puncak-puncak” kebudayaan di daerah-daerah, sekurang-kurangnya kita memperoleh banyak informasi tentang kebudayaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas di luar unsur-unsur kebudayaan termaksud. Mengingat Kebudayaan Nasional itu harus merupakan buah budinya rakyat Indonesia seluruhnya, maka apa yang dapat dilakukan ialah dengan menawarkan sebanyak mungkin unsur-unsur kebudayaan daerah atau kebudayaan suku bangsa seperti judul hasil Kajian Ekspresi Keragaman Budaya, maupaun Inventarisasi Pelindungan Karya Budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT), seperti judul-judul sebagai berikut :

1. Fungsi dan Makna Ritual Nampah Batu di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
2. Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tradisi Matiti Suara, di Pura Batur, Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
3. Roah Adat Ruwatan Cara Sasak, di Desa Loang Baloq, Kota Mataram.
4. Ritual Maulid Adat Masyarakat Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
5. Ritual Rebo Buntung di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
6. Upacara Gren Mahe (Penghormatan Leluhur) di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Upacara Pemanggilan Buaya di Kabupetan Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur
8. Ritual Wulla Poddu di Kampung Umbu Koba, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
9. Makepung di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

10. Gendang Beleg di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
11. Wayang Menak Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
12. Kesenian Caci di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
13. Sasandu Alat Musik Tradisional Rote Ndao.

Hasil Kajian Perlindungan Ekspresi Keragaman Budaya dan Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya yang ditulis oleh para peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT) bekerjasama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana serta beberapa sarjana dari universitas lain yang ada di Bali seperti Universitas Hindu Indonesia dan Institut Seni Indonesia Denpasar.

Oleh karena itu penerbitan hasil Kajian Ekspresi Keragaman Budaya dan Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya sangat besar artinya, dalam pemahaman Warisan Budaya Nasional (Warnas) sebagai media Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Lebih-lebih dalam rangka mewujudkan adidaya budaya di tanah air Indonesia.

Jakarta, Desember 2012
Direktur Jenderal Kebudayaan


Kacung Marijan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BADUNG (BALI, NTB, NTT)	iii
KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KORUPSI MENURUT SASRA HINDU	4
A. Korupsi Menurut Arthashastra	4
B. Membangun Karakter Anti-korupsi Menurut Sarasamuscaya, Bagawadgita, dan Menawa Dharmasastra	7
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	11
A. Danau dan Gunung Batur Mitos Kekunaan Desa Batur-Kintamani	11
a. Sejarah Desa Batur	11
b. Sejarah Pura Ulun Danu Batur	14
c. Bangunan-Bangunan Suci di Pura Ulun Danu Batur	16
d. Geografis Desa Batur Kintamani	18
e. Keadaan Penduduk Desa Batur	19
f. Bentuk-Bentuk Tradisi Bernilai Karakter Bangsa	21
g. Aktualisasi Nilai Tradisi	24
h. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebertahanan Tradisi	25
B. Tradisi Matiti Suara Masyarakat Desa Batur Kintamani	27
a. Tradisi dan Filosofi Matiti Suara dalam Pelaksanaan Upacara Bakti Papranian Ngusaba Kadasa Masyarakat Pakraman Masyarakat Desa Batur Kintamani	29
b. Tempat, Pelaksana, dan Sarana Prasarana Tradisi Matiti Suara	31
C. Prosesi Tradisi Matiti Suara	36
a. Laporan Manggalaning Upacara	36
b. Laporan Pengerauhan dan Penelasan	36
c. Dharma Wacana	36
d. Tarian Perang-perangan	37
e. Matiti Suara	37

D. Nilai Pendidikan Tradisi Matiti Suara dalam Masyarakat Desa Pakraman Batur Kintamani	39
a. Prinsip-prinsip Pendidikan Anti Korupsi dalam Tradisi Matiti Suara	40
b. Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Tradisi Matiti Suara	44
BAB IV PENUTUP	47
Rekomendasi	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etiket dan moralitas kehidupan. Sudah jamak diketahui, peninggalan peradaban yang diwariskan nenek moyangnya, baik dalam bentuk peninggalan benda (*tangible*) dan tidak benda (*intangible*) menunjukkan hal itu. Bangsa Indonesia dalam catatan sejarah peradaban terabadikan sebagai bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kegotong-royongan, keramah-tamahan, kemurnian insani, ketulusan nurani, kejujuran yang tinggi, dan nilai-nilai keadaban lainnya; sebagaimana terpatrit dalam butir-butir nilai idiologi bangsa Pancasila dan UUD 45.

Nilai-nilai mulia karakter bangsa Indonesia, yang diuraikan di atas sepertinya tidak menurun dan berimplementasi pada kehidupan masa kini. Bangsa Indonesia cukup lama didera dan disandera dengan berbagai persoalan yang banyak menguras energi dan tidak memberikan keberuntungan. Kita dengan mata telanjang begitu mudah membaca dan menyaksikan kependiran-kependiran yang dipertontonkan anak bangsa ini. Mereka tidak hanya datang dari kalangan masyarakat bawah yang serba berkekurangan, tetapi lebih jamak lagi dari kalangan intelektual terpelajar yang *nota bena* adalah kaum berada dan juga terpendang. Kita dengan begitu gampang mengakses informasinya. Beritanyapun menyebar luas di berbagai media massa cetak, elektronik, bahkan lebih "ebah" lagi di dunia maya, seperti di internet.

Setiap hari, setiap saat ada saja berita yang membuat para pendiri bangsa ini "merintih perih dan menangis". Betapa tidak? Perkelaian, pertengkaran, pembunuhan, perampokan, penipuan, keculasan, dan pamer aneka kecurangan di muka umum, seperti tidak ada tanda-tanda yang mampu mengerem dan apa lagi menghentikannya. Tambahan lagi, kasus tauran pelajar merebak dari ibu kota hingga ke pelosok desa, anarkisme konflik warga, tindakan kebablasan dari mentalitas nerabas menghalalkan berbagai cara, merasa paling benar dan ingin menang sendiri, dan sejenisnya lagi sedang semarak berlangsung di negeri tercinta ini.

Dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang dibangkitkan dari peradaban yang menghormati keniscayaan keberagaman (*bhinneka tunggal ika*), dan akar *humanism* yang menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan yang luhur sebagai wujud prakerti karakter bangsa ini, semakin dijauhi dan "dimusuhi" anak zamannya. Tambahan perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran yang sedang mendera dan menyandra bangsa dan tanah air Indonesia kini adalah korupsi. Perilaku korup anak zaman ini kalau tidak segera diatasi, cepat atau lambat akan "menenggelamkan" bangsa Indonesia ke titik nadi terendah dalam kehidupan berbangsa. Catatan sejarah suram mencatat perilaku kotor ketidakjujuran; "mencuri milik negara dan hak-hak rakyat" untuk maksud memperkaya pribadi dan golongan di tengah kehidupan bangsa ini sedang merebak di mana-mana. Perilaku mereka yang korupsi, seperti dipertontonkan di media cetak dan elektronik, terkadang menyayat hati, seperti tontonan sirkus dan sulap dengan berbagai atraksi serta terik-terik *kamuplase*.

Korupsi adalah musuh setiap negara-bangsa. Korupsi telah menggagalkan berbagai program pembangunan, bahkan menenggelamkan rakyat pada jurang penderitaan yang paling dalam. Oleh karena itu, perlawanan terhadap segala bentuk korupsi menjadi agenda utama pada berbagai negara, juga termasuk Indonesia. Upaya serius pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi tampak dari semakin banyaknya kasus korupsi yang berhasil diangkat ke permukaan dan menjadi konsumsi publik melalui berbagai media massa. Di samping itu, juga pemberdayaan

masyarakat anti-korupsi telah digelorakan melalui berbagai forum. Melalui penegakan hukum, partisipasi media, dan pemberdayaan masyarakat diharapkan agar korupsi dapat diminimalisasi, bahkan ditiadakan sama sekali di Indonesia.

Pemberantasan korupsi memang bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan kerja secara sistemik dengan mengoptimalkan segenap aspek yang saling terkait satu sama lain. Terlebih lagi jika korupsi telah membudaya dan mentradisi dalam sistem birokrasi. Hal ini sebagaimana terungkap dalam pernyataan Schrool dalam Hamzah (2007) berikut ini.

“Indonesia pada bagian pertama tahun 1960, situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak di antara mereka mendapatkan tambahan itu dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa korupsi dalam kalangan birokrat di Indonesia, bermula dari rendahnya gaji sehingga memaksa mereka untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara meminta uang ekstra. Akan tetapi, ketika gaji pegawai negeri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ternyata juga tidak menjadikan korupsi hilang dari negeri ini. Kasus Gayus Tambunan telah membuka mata masyarakat Indonesia, bahwa gaji yang besar tidak serta-merta mampu memutus rantai korupsi di negeri ini. Boleh jadi, korupsi yang semula terjadi karena keterpaksaan lambat laun berubah menjadi kenikmatan sehingga terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, lazimnya sebuah tradisi.

Korupsi tentu tidak diharapkan muncul dalam sebuah negara-bangsa yang mencita-citakan kesejahteraan (*welfare state*). Akan tetapi, kesulitan setiap bangsa dalam memberantas korupsi menandakan bahwa tradisi ini bermula pada mentalitas sebagai struktur psikis budaya (Koentjaraningrat, 2002; Sutrisno, 2008). Korupsi menjadi persoalan mentalitas ketika berbagai produk hukum yang diciptakan tidak mampu mengurangi intensitas korupsi di suatu negara. Mentalitas ini bermula dari perilaku keseharian, bahkan seringkali telah tertanam dalam keluarga. Perilaku korupsi dapat dimulai dari keluarga misalnya, kebiasaan anak-anak menaikkan (*mark up*) harga sebuah buku kepada orang tuanya. Hal sederhana juga biasanya dilakukan orang tua dengan menyuap anak-anaknya dengan sebiju permen agar tidak menangis. Artinya, kejujuran dan karakter anti-korupsi lainnya, sesungguhnya dapat dibangun dari nilai-nilai keseharian yang berkembang dalam keluarga dan masyarakat.

Uraian tersebut, menegaskan pentingnya moralitas untuk membangun mentalitas dan karakter bangsa yang anti-korupsi. Bangsa Indonesia yang dikenal religius sudah sepatutnya menjadikan pembangunan moralitas dalam skema besar (*grand design*) pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, setiap agama diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masalah korupsi yang sedang menyandera bangsa ini, harus dicarikan jalan keluar, sesulit dan seberliku apapun medannya, harus ditempuh dan selalu diusahakan. Artinya kita harus cepat dan cerdas memotong mata rantainya. Salah satunya jalan yang baik adalah balik ke citra tradisi luhur bangsa, yang telah terbukti menjadi pekerti mulia dan pembentuk karakter moralitas bangsa pada zamannya. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang tumbuh dan lama melekat pada tradisi milik suku bangsa ini harus diangkat untuk dipelajari dan diapresiasi sebagai warisan luhur bangsa. Karena maksud dan tujuan inilah penelitian ini mengangkat tradisi *Matiti Suara* di Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ini.

Tradisi *Matiti Suara* di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali adalah tradisi yang sejak berabad-abad mendidik warga Desa Pakraman Batur, Kintamani agar

berdedikasi mulia, berperilaku tulus dan ikhlas dalam mengabdikan diri untuk kedamaian dan kesejahteraan lahir batin masyarakat banyak di desanya. Tradisi *Matiti Suara* ini berkaitan erat dengan rangkaian upacara *Ngusaba Kadasa* (seputar bulan April) yang dilakukan setiap setahun sekali oleh masyarakat Desa *Pakraman Batur* di Pura *Kahyangan Jagat* Pura Batur, Kintamani, Bangli.

Mengingat tradisi *Matiti Suara*, sarat dengan nilai-nilai pendidikan yang dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi saat mendedikasikan pengabdian diri pribadi untuk kemuliaan orang banyak, penting dipelajari. Penelitian dengan topik "Pendidikan Antikorupsi Melalui Tradisi *Matiti Suara* di desa *Pakraman Batur*, Kintamani" ini peneliti pahami sebagai nilai kearifan bangsa dari Bali patut dikenal dan diapresiasi, terlebih saat mana bangsa Indonesia sedang menghadapi teror korupsi yang dilakukan oleh anak bangsanya sendiri. Penelitian ini menjadi menarik dan bermanfaat manakala dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi kepada pemegang kebijaksanaan (semisal KPK) atau siapapun yang memerlukan. Itulah alasan-alasan yang menjadi dasar pemikiran, mengapa penelitian ini penting dilakukan. Sebagai sebuah permasalahan penelitian ini ingin melihat secara lebih dalam mengenai bentuk-bentuk kekunaan masyarakat Desa Batur, pelaksanaan tradisi *Matiti Suara*, mengapa setiap mengakhiri upacara melakukan upacara *Matiti Suara*, dan nilai-nilai pendidikan yang dapat mendidik masyarakat desa Pakraman Batur agar tidak melakukan korupsi.

BAB II KORUPSI MENURUT SASTRA HINDU

A. Korupsi Menurut *Arthashastra*

Dalam Hindu, persoalan korupsi sesungguhnya telah mendapatkan perhatian serius dalam berbagai sastranya. *Arthashastra* – referensi penting dalam sistem politik dan ketatanegaraan Hindu – mengungkapkan bahwa penyelewengan keuangan negara oleh pejabat merupakan suatu keniscayaan. Demikian juga kitab-kitab lainnya dapat dieksplorasi secara luas dan mendalam sebagai bentuk kontribusi Hindu dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya.

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” yang dalam bentuk kata kerja “*corrumpere*” berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, dan menyuap. Selain itu, juga diartikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Dreher, Kotsogiannis, Mc.Corrison, 2004). Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, (a) perbuatan melawan hukum; (b) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (c) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan (d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi lainnya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi penyelenggara negara).

Dalam arti yang lebih spesifik korupsi cenderung dimaknai sebagai korupsi politis, yaitu penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi politis ini memberikan dampak negatif bagi demokrasi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena menggunakan cara-cara yang dapat menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi dapat mengikis kemampuan institusi pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat dapat diangkat atau dinaikan jabatannya bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga dapat mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak-efisienan yang tinggi. Misalnya, anggaran pembangunan banyak tersedot untuk memberikan suap kepada pejabat sebagai upaya perusahaan untuk memenangkan tender. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa korupsi akan semakin menjauhkan negara-bangsa dari kesejahteraan umum yang dicita-citakan bersama. Puncaknya bahwa korupsi menciptakan sistem *kleptokrasi*, yakni pemerintahan para pencuri (<http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>, akses 1 Desember 2012).

Dapat dipahami bahwa pengertian korupsi mencakup segala tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pembicaraan tentang korupsi memang lebih terkonsentrasi pada korupsi politis, yaitu korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Hal ini juga menjadi pembicaraan penting dalam Hindu, khususnya terkandung dalam *Kautilya Arthashastra*. Dalam kitab ini dijelaskan tentang katagori penyelewengan uang negara atau korupsi, sebagai berikut. *Pertama*, penyimpangan dalam bentuk menggunakan kekayaan milik negara untuk keuntungan pribadi, misalnya menyewakan atau menjual kekayaan milik negara. *Kedua*, penggelembungan (*mark-up*) dan pengurangan harga-harga dalam pengadaan barang-barang kebutuhan negara (Radendra S, 2005:72-73).

Terkait masalah korupsi, *Arthashastra* beranjak dari anti tesis bahwa setiap pejabat berpotensi melakukan penyelewengan uang negara dalam tugasnya. Oleh karena itu, setiap pejabat negara harus mendapatkan pengawasan secara serius. Pengawasan kepada pejabat tinggi negara dilakukan dengan pertimbangan antara lain, (a) terkait dengan kesetiaan terhadap negara, (b) adanya penyusupan dari negara musuh, dan (c) tindakan penyelewengan keuangan negara (*Kautilya Arthashastra*, I. 13.7.12). Dalam *Arthashastra* juga dijelaskan bahwa semua pejabat yang telah dipilih dan diangkat sesuai dengan kualitasnya hendaknya mendapatkan pengawasan karena manusia tidak tentu pikirannya, seperti kuda yang dapat berubah bila dipekerjakan (*Kautilya Arthashastra*, II.12.27.3). Salah satu bentuk dugaan yang digunakan dalam *arthashastra* untuk melihat seorang pejabat yang melakukan penyelewengan negara adalah bila seorang pejabat dengan penghasilan kecil, tetapi mempunyai pengeluaran yang besar, sesungguhnya ia telah menghabiskan uang negara (*Kautilya Arthashastra*, II.12.27.10). Lebih lanjut ditegaskan dalam *Kautilya Arthashastra* bahwa seorang pejabat dapat menyelewengkan uang negara dengan cara mengelabui pemerintah melalui laporan fiktif, ataupun menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan pribadi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, *Arthashastra* menekankan pada empat aspek penting, yakni (1) moralitas, (2) kualitas, (3) pengawasan, dan (4) penegakan hukum. *Pertama*, *Arthashastra* berpendapat bahwa moralitas merupakan dasar untuk membangun negara yang bersih dari korupsi. Moralitas seseorang harus menjadi dasar pertimbangan rakyat untuk memilih pemimpinnya, juga bagi pemimpin dalam memilih pejabat negara. *Kedua*, pemimpin dan pejabat negara harus dipilih berdasarkan kualitasnya, yakni kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan fungsi yang diembannya. *Ketiga*, pentingnya pengawasan kepada para pejabat negara. Asumsinya bahwa moralitas dan kualitas saja tidak cukup menjadikan seorang pejabat yang bersih dari korupsi karena pikiran mereka dapat berubah sewaktu-waktu sehingga diperlukan pengawasan. *Keempat*, penegakan hukum menjadi panglima dari ketiganya karena tugas negara adalah menjamin tegaknya aturan (*dharma*) demi terciptanya tertib hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Uraian di atas, memberikan gambaran bahwa setiap pejabat negara sesungguhnya memiliki potensi yang sama untuk melakukan tindakan korupsi, bahkan yang paling jujur sekalipun. Hal ini karena pikiran setiap orang dapat berubah setiap saat, seperti niat yang muncul tiba-tiba ketika kesempatan juga mendukung. Oleh karena itu, moralitas, kualitas, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi empat hal utama yang direkomendasikan *Arthashastra*. Ini menegaskan bahwa persoalan paling mendasari dari korupsi adalah mentalitas yang tercakup di dalamnya moralitas dan kualitas pribadi seseorang. Artinya, pemberantasan korupsi harus dimulai dengan membangun karakter anti-korupsi dalam diri setiap orang terutama para pejabat negara. Tujuannya adalah terbentuknya pengendalian diri yang kuat sehingga tidak muncul niat untuk korupsi, meskipun kesempatan terbuka lebar.

Dalam *Arthashastra* dijelaskan bahwa selain moralitas dan kualitas pejabat negara, juga pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Kedua hal ini merupakan pengendalian secara eksternal dengan asumsi bahwa setiap pejabat negara memiliki potensi melakukan korupsi. Melalui pengawasan dan audit seorang pejabat negara dapat diketahui kinerjanya dan indikasi korupsi selama masa kepemimpinannya. Sementara itu, melalui penegakan hukum pelaku-pelaku korupsi dapat dibersihkan dari struktur birokrasi, juga memutus rantai sistemik yang ditimbulkannya.

Arthashastra merekomendasikan asas penghematan keuangan negara dalam penggunaan anggaran belanja. Asas ini dilaksanakan dengan tujuan agar anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk menambah kekayaan negara, menjalankan pemerintahan dengan baik, dan menjamin kehidupan masyarakatnya selama kurun waktu tertentu terutama ketika negara tidak mendapatkan

B. Membangun Karakter Anti-korupsi Menurut Sarasamuscaya, Bagawadgita, dan Menawa Dharmasastra

Pentingnya pembangunan karakter anti-korupsi karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk bebas. Manusia memiliki kehendak bebas dan kebebasan untuk membangun eksistensinya sendiri, baik individu maupun sosial. Kehendak bebas dan kebebasan manusia yang mengalami puncaknya pada pendewaan intelektualitas dan rasionalitas menandai terjadinya eksplorasi dan eksploitasi pikiran tanpa batas. Akibatnya, manusia seringkali terseret dalam arus materialisme, hedonisme, dan pragmatisme. Perilaku korupsi menunjukkan kuatnya pesona materialisme yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat pragmatis. Hal ini dapat dijelaskan mengingat pikiran rasional memang bersifat liar, tidak pernah diam, penuh kegelisahan, penuh keinginan, seperti disebutkan dalam kitab *Sarasamuccaya*, 81, sebagai berikut.

*Duragam bahudaghami prarthanasamsayatmakam,
Manah suniyatam yasya sukhi pretya vaha ca.*

*Nihan ta krama nikang manah, bhanta lungha svabhawanya, akweh mangen-
anganya, dadi prathana, dadi sangsaya, pinakawaknya, hana pwa wwang ikang wenang
humeret manah, sira tika menggeh amanggih sukha, mangke ring paraloka kabeh.*

Artinya:

“Keadaan pikiran itu demikianlah tidak berkententuan jalannya, banyak yang dicita-citakannya, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya; jika ada orang dapat mengendalikan pikirannya, pasti orang itu memperoleh kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia yang lain”.

Sloka ini menegaskan bahwa pengendalian diri dimulai dari kesadaran untuk memahami pikiran yang liar sifatnya. Pikiran adalah sumber keinginan yang dapat muncul tiba-tiba, ibarat kuda yang bergerak ke segala arah. Pentingnya pikiran untuk dikendalikan karena pikiranlah yang berhubungan dengan objek-objek melalui indera (*indriya*). Sentuhan dengan objek duniawi ini menimbulkan bermacam-macam sensasi dan fenomena kejiwaan yang tercermin dalam setiap perbuatan manusia. Sensasi-sensasi inilah yang kemudian membelenggu Sang Diri (*Atman*) sehingga ia lupa (*aturu*) pada kesejatiannya. Oleh karena itu, pikiranlah yang harus dikendalikan terlebih dahulu dari keterikatan pada objek-objek inderawi sehingga ia menjadi pikiran yang berkesadaran (*consciousness mind*). Dalam kesadaran inilah, Sang Diri akan dapat menemukan kembali hakikat diri sejatinya (*matatur ikang atma ri jatinya*). Sebaliknya, Sang Diri yang kehilangan kesadaran justru akan terjebak pada sensasi-sensasi objek duniawi yang menjadikan dirinya budak *indriya* (Sura, 1985:35—36).

Pengendalian diri adalah kemampuan dalam mengendalikan *indriya* dan mengontrol gerak pikiran. Apabila *indriya* dapat dikendalikan, maka manusia tidak mengalami kemelekatan dengan objek-objek duniawi. Selanjutnya, melalui pikiran yang terkontrol ia dapat memilah dan memilih arti kehadiran objek-objek inderawi dalam kehidupannya sehingga tidak mengikat diri pada objek-objek tersebut. Mengingat pikiran (*manah*) yang terhubung dengan berbagai macam objek duniawi melalui *indriya* akan memicu kerja ego (*ahamkara*) untuk menginginkannya. Pengendalian pikiran berhubungan erat dengan cara manusia dalam mengendalikan keinginan, nafsu, dan selera (*kama*). Pikiran-pikiran hedonis yang mementingkan terpenuhinya keinginan tanpa batas dapat dipandang sebagai akibat dari kurangnya pengendalian diri. Termasuk di dalamnya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan material secara cepat dan mudah melalui tindakan korupsi.

Walaupun demikian, keinginan (*kama*) merupakan bagian paling esensial dalam kehidupan manusia. Mengingat tanpa *kama* eksistensi manusia di dunia ini tidak akan terpelihara, bahkan tidak mungkin untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, pemahaman terhadap transformasi *kama* menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan hidup manusia. *Kama* mendorong orang untuk berbuat sesuatu, mendorong orang bergairah, dan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Dengan dorongan *kama*, manusia tergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*artha*), memiliki benda-benda duniawi yang menjadikannya mudah dan nikmat merasakan hidup. Akan tetapi, memenuhi tuntutan *kama* dan mendapatkan *artha* tanpa dasar *dharma* orang tidak akan memperoleh kebahagiaan, bahkan bisa terjerumus dalam kesengsaraan (*dukha*). Maka dari itu, *dharma* harus menjadi pengendali dalam memenuhi *kama* dan *artha*, seperti dijelaskan dalam *Sarasamuscaya*, *sloka* 12 berikut ini.

Yan paramarthanya, yang artha kama sadhyan, dharma juga lekasakena rumuhun, niyata katemwaning artha kama menetan paramartha wi katemwa ning artha kama dening anasar sakeng dharma.

Artinya:

“Pada hakikatnya, jika *artha* dan *kama* dituntut, maka seharusnya *dharma* hendaknya dilakukan lebih dulu. Tidak dapat disangsikan lagi, pasti akan diperoleh *artha* dan *kama* nanti. Tidak akan ada artinya jika *artha* dan *kama* itu diperoleh menyimpang dari *dharma*”.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa *dharma* adalah landasan dalam memenuhi *kamadan* mendapatkan *artha*. Seseorang yang memperoleh segala sesuatu tanpa dilandasi dengan *dharma* sesungguhnya adalah pencuri. Hal ini sejalan dengan salah satu ajaran *Bhagavad Gita* (Bab III, 12), sebagai berikut.

*Istan bhogan hi vo deva, dasyante yajna bhavitah
Tair dattan apradayaibhayo, yo bhukte stena eva sah*

Artinya:

Para Dewa mengurus berbagai kebutuhan hidup. Bila para dewa dipuaskan dengan pelaksanaan *yajna* (korban suci), mereka akan menyediakan segala kebutuhan untukmu. Tetapi orang yang menikmati berkat-berkat itu tanpa mempersembahkannya kepada para dewa sebagai balasan, sesungguhnya dia adalah pencuri.

Persembahan kepada para dewa adalah persembahan yang terbaik, yakni segala yang diperoleh dengan landasan *dharma*. Segala persembahan yang tidak diperoleh melalui jalan *dharma*, seperti uang hasil korupsi tentu bukanlah persembahan yang terbaik dan tidak akan diterima pahalanya. Hal ini juga ditegaskan dalam *Sarasamuccaya* 149, sebagai berikut.

*Ye dhananyapakarsanti narah svalamasritana,
Hared dharmakam ca pramusanti na samsayah.
Yapwan mangke kraman ikang wwang, angalap maning namas, makapanghada kesaktinya,
kwehing hambanya, tatan mas nika juga inalap nika, apa pwa dharma, artha, kama, nika milu kaalap denika.*

Artinya :

Jika ada orang yang merampas kekayaan orang lain dengan berpegang pada kekuatan dan banyak pengikutnya, malahan bukan harta kekayaan hasil curiannya saja yang akan terampas darinya, tetapi juga *dharma*, *artha*, dan *kamanya* itu turut terampas karena perbuatannya.

Sloka di atas, menunjuk pada perilaku seorang koruptor yang merampas kekayaan orang lain, bahkan bangsa dan negaranya dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki. Tindakan ini tidak hanya akan menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat menyebabkan hancurnya *dharmā*, *artha*, dan *kama*. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan adalah pelanggaran pada aturan (*dharmā*) yang bila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan rusaknya seluruh sistem kenegaraan. Korupsi juga akan mengakibatkan kerugian negara (*artha*) yang dalam kondisi paling akut dapat berakibat pada kemiskinan negara-bangsa. Apabila kemiskinan struktural dan moral telah melanda suatu bangsa, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan semakin jauh dari keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup (*kama*). Dengan demikian, korupsi dapat mengakibatkan kehancuran sistemik bagi suatu bangsa dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, juga *Sarasamuccaya* 150 menjelaskan sebagai berikut.

*Aharan kasyacid dravyam yo narah sukhā mavaset,
Sarvatah sankitah steno mrgo grammavigatah.
Kunang ika wwan tapwan hana pwa inalapnya,
Darbyaning asing-asing, ya ika wastuning tan hana,
Katakutannya, lilasing saparanya kunang ikang maling ngaranya,
Sakwayan sarwa sangsaya irika, nihan padanya kadi kramaning merga mara ring grama.
Artinya :*

“Orang yang tidak pernah mencuri barang milik siapapun juga, sesungguhnya tidak ada yang ditakuti olehnya, ia akan selalu gembira kemanapun juga. Sebaliknya, yang disebut pencuri, kemanapun perginya akan selalu dicurigai, demikianlah keadaannya seperti halnya seekor kijang atau binatang liar yang masuk desa”.

Seloka ini menegaskan bahwa tindakan korupsi akan menyebabkan hidup pelakunya tidak akan tenang. Paling tidak, ia akan selalu dikejar-kejar perasaan bersalah dan selalu dihantui oleh jerat hukum yang akan menimpanya. Hal ini seharusnya dapat dijadikan kendali moral agar tidak melakukan korupsi. Jadi, membangun karakter anti-korupsi harus dimulai dari pengendalian diri terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan kebenaran (*dharmā*). *Dharma* harus selalu menjadi landasan dalam mendapatkan *artha* dan *kama*. Sebaliknya, *artha* dan *kama* yang diperoleh tanpa landasan *dharmā* sama saja dengan mencuri. Pengendalian diri inilah yang utama karena peluang dan kesempatan untuk korupsi bisa saja muncul sewaktu-waktu. Tanpa pengendalian diri, orang dapat saja terjerumus oleh nikmatnya pesona material dengan cara yang cepat dan mudah. Dengan demikian, ungkapan “orang tidak korupsi karena belum mendapatkan kesempatan” tidak berlaku lagi di sini. Mengingat akibat dari pelanggaran moral (*dharmā*) akan menimpa, baik secara fisik maupun psikis, bahkan *niskala*.

Dalam hukum Hindu, konsep keadilan juga ditetapkan berdasarkan kedudukan dan kewenangan seseorang (*catur warna*). Seorang *sudra* yang melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman lebih rendah, dibandingkan dengan *waisya*, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Manawa Dharmasastra*, 337, sebagai berikut.

*Astāpādyam tu çūdrasya steye bhawati kilbisam,
sādaçaiwa tu waiçyasya dwātrimçat ksatriyasya ca.*

Artinya :

“Dalam hal pencurian, seorang *sudra* yang bersalah dihukum delapan kali lipat, *waisya* dengan enam belas kali lipat dan *ksatria* sebesar tiga puluh dua kali lipat.”

Penjelasan ini menegaskan bahwa, semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pula hukuman yang akan diberlakukan kepadanya bila melakukan pelanggaran hukum. Mengingat mereka dipandang memiliki kualitas dan kompetensi yang lebih baik dibandingkan masyarakat kebanyakan. Mereka yang semestinya menjadi teladan dan pengayom masyarakat, tetapi menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki dapat diberikan hukuman yang berat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam Hindu tidak dikenal adanya pengistimewaan seseorang di mata hukum. Artinya, kasus yang mencederai keadilan hukum, seperti pencuri semangka yang dihukum kurungan selama enam bulan, sebaliknya koruptor bebas berkeliaran tidak akan terjadi dalam hukum Hindu.

BAB III PEMBAHASAN

A. Danau dan Gunung Batur Mitos Kekunaan Desa Batur-Kintamani

Membicarakan desa *Pakraman* Batur Kintamani dalam kekunaan situs-situs peradaban yang ada tidak dapat dilepaskan dari keberadaan danau dan gunung Batur sendiri. Betapa tidak keberadaan situs-situs kekunaan di desa *Pakraman* Batur Kintamani semuanya berlatar belakang dari wacana mitos-idiologis kehadiran danau dan Gunung Batur itu sendiri. Karena itu, argumen yang paling akurat dan paling awal menjelaskan kekunaan desa *Pakraman* Batur Kintamani adalah dengan menghadirkan penjelasan mengenai keberadaan Danau Batur dan Gunung Batur.

Danau Batur mempunyai kaitan yang erat dengan Gunung Batur, yang memiliki ketinggian 1031 meter di atas permukaan laut, sehingga dengan mudah mengalir daerah-daerah yang lebih rendah. Ada apa pada kedua situs alam ini? Secara fisik dari salah satu lubang kepundan Gunung Batur itu mengeluarkan air dan alirannya itulah yang membentuk genangan air danau yang diberi nama Danau Batur. Kata *batur* selain menjadi nama salah satu gunung berapi dan danau terbesar di Bali, menjadi pula nama salah satu dari enam desa kuna yang terletak di pinggir Danau Batur. Desa-desa lainnya ialah: Desa Songan, Abang, Trunyan, Buahman dan Kedisan. Letak desa-desa ini terpecah mengelilingi Danau Batur dan disebut Desa *Wintang/Bintang Danu*. Secara geografis Desa Songan dan Desa Batur berada di antara gunung dan Danau Batur. Danau ini menjadi pusat pengairan dari sebagian besar sawah-sawah yang ada di Bali, meliputi kabupaten Bangli, Gianyar, Klungkung, Buleleng, Tabanan, dan Badung. Kabupaten Tabanan secara khusus mendapat pengairan dari danau Bratan. Danau ini dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan Danau Batur. Keberhasilan sawah-sawah di kabupaten tersebut sangat tergantung pada pasang surut keadaan air dari Danau Batur. Oleh karena itu, di *madianing* (pertengahan) Gunung Batur berdekatan dengan Desa Batur, dibangun tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, sumber segala serta pemberi eksistensi kepada danau dan gunung Batur. Walaupun tempatnya di *madianing* gunung Batur tetapi pemujaan diutamakan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi sebagai pemberi eksistensi kepada Danau Batur. Hal ini mengingat danau Batur lebih dominan dari gunung Batur khususnya di bidang pertanian. Bhatari Dewi Danuh atau Batari Dewi Danu, Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa dalam kemahakuasaan-Nya menganugerahkan kemakmuran di jagat raya ini.

a) Sejarah Desa Batur

Sejarah desa *Pakraman* Batur yang berlokasi di Kalanganyar ini berkaitan erat dengan keberadaan peristiwa alam meletusnya gunung Batur dan usaha menyelamatkan Pura Ulun Danu Batur dari erupsi-erupsi gunung Batur pada masanya dan juga di masa-masa mendatang. Seperti telah diketahui gunung Batur merupakan salah satu gunung berapi yang ada di Bali. Gunung ini sampai sekarang masih sering mengepul asap yang menandakan gunung ini masih sangat aktif. Tidak diketahui dengan pasti kapan gunung itu pertama kali meletus. Para ahli geologi memperkirakan bahwa gunung Batur telah meletus beberapa ribu tahun yang lalu. Sebagian dari lubang kepundannya tergenang air kemudian berubah menjadi sebuah danau yang sekarang dikenal dengan nama *Danu / danau Batur*.

Sebagaimana diketahui, bahwa di *madianing* Gunung Batur, berdekatan dengan danau dan Desa Batur, dibangun sembilan buah pura (11 *pelebahan*) yang menjadi satu kesatuan disebut Pura Ulun Danu Batur. Kesebelas Pura itu adalah: Pura Jati, Pura Tirtha Bungkah, Pura Tirtha Mas Mampeh, Pura Taman Sari, Pura Sampian Wangi, Pura Gunarali, Pura Padangsila, Pura Jaba Kuta, Pura Batu Sepit/Batu Rupil, Pura Pelisan dan Pura Pasar Agung.

Berdasarkan beberapa sumber yang sempat dibaca, misalnya *Lontar Purana Tatwa* yang menceritakan berbagai hal mengenai kekerabatan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan di Bali, seperti kerajaan Gelgel, Bangli, Taman Bali, Nyalian, dan yang lainnya. Dinyatakan bahwa kerajaan-kerajaan itu mempunyai tugas serta hubungan erat dengan Pura Batur dan Pura Besakih. Ini menunjukkan bahwa Pura Batur sudah ada pada abad ke-13, karena kerajaan Majapahit di Jawa Timur baru berdiri pada tahun 1293 Masehi.

Dari sumber tertulis yang ada mencatat bahwa gunung Batur telah meletus beberapa kali. Pada tahun 1917 tercatat letusan yang sangat dahsyat, menewaskan sekitar 1000 penduduk serta merusakkan hampir 2500 pura. Kemudian pada tahun 1926 terjadi pula letusan yang cukup dahsyat menyebabkan Pura Ulun Danu Batur yang meliputi 11 *pelebahan* (11 buah Pura) yang ada di *madianing* gunung Batur dipindahkan ke daerah Kalanganyar dekat Kintamani. Pada posisi tempat inilah dibangun kembali 9 *palebahan* pura sesuai dengan denah serta bentuk semula, semasih berlokasi di *madianing* gunung Batur berdekatan dengan Danau Batur. Pura ini disebut sesuai dengan nama semula yaitu Pura Ulun Danu Batur, walaupun letaknya tidak masih berdekatan dengan Danau Batur. Rupanya ada beberapa Pura yang tidak bisa dipindahkan untuk selamanya terutama yang berkaitan dengan *tirtha* (air suci) sehingga setelah keadaan memungkinkan, pura-pura tersebut perlu dibangun kembali berdekatan dengan danau Batur, misalnya Pura Jati, Pura Tirtha Bungkah, Pura Tirtha Mas Mampeh, dan lain-lainnya.

Mengenai keberadaan daerah Kalanganyar ini disebutkan di dalam Raja Purana Pura Batur 49a.l. sebagai berikut:

“nghing wusampun ginanti paryyangan ira Batara, ring Tampuryyang nguni, mangke hana mungwing kalanganar ngaran Batur kalanganar. Apan nguni purwa telas dening karuganing paranganagni, wetu saking madyaning giri”.

Jadi daerah Kalanganyar merupakan areal khusus untuk lokasi Pura Ulun Danu Batur yang baru dipindahkan. Desa-desanya yang berdekatan dengan daerah Kalanganyar adalah :desa Bayung Gede, Buahon, Sekardadi, Bonyoh, Pasi Belatungan (Lateng), Blangan, Selulung (Petak Cemeng), Tajun (Pakisan), dan desa Sri Batu. Desa-desanya ini berada di wilayah Kecamatan Kintamani. Dalam hubungannya dengan Pura Ulun Danu Batur/ Pura Batur, desa-desanya itu merupakan *Batun Sendin Ida Bhetari*, menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan upacara *yajna* serta menjaga Pura Ulun Danu Batur, yang pada mulanya berada di *madianing* gunung Batur.

Daerah Kalanganyar yang pada mulanya menjadi lokasi baru dari Pura Ulun Danu Batur, menjadi pula tempat tinggal baru bagi masyarakat Desa Batur yang ikut dipindahkan karena mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga serta menyelenggarakan upacara-upacara di Pura Ulun Danu Batur yang baru dipindahkan itu. Mereka bertempat tinggal di sekitar Pura Ulun Danu Batur dan tempat mereka yang baru ini disebut pula *Desa Batur*.

Dalam mengemban tugas ini mereka dipimpin oleh Jero Gede Makalihan, yaitu: Jero Gede Kanginan (*Duwuran*) dan Jero Gede Kawan (*Alitan*). Di samping memimpin masyarakat Desa Batur untuk menjaga serta menyelenggarakan *aci* (upacara), Jero Gede Makalihan mempunyai pula tugas dan kewajiban mengingatkan para anggota subak agar menghaturkan *sarin tahun* sesuai dengan ucap *Raja Purana* Pura Batur. Kepada Sang *Mawa Rat* (Raja/Pemerintah yang berkuasa) di Bali. Jero Gede Mekalihan berkewajiban untuk mempermaklumkan keadaan pura serta *aci* yang terselenggara ataupun yang tidak bisa dilakukan.

Pada masa lampau, dapat dibayangkan kesulitan yang harus mereka hadapi mengingat daerah pertanian serta mata pencahariannya berada di kaki Gunung Batur dan Danau Batur (menangkap

ikan). Walaupun demikian mereka tidak berani meninggalkan daerah Batur dalam arti meninggalkan Pura Ulun Danu Batur, untuk menetap kembali ditempatnya semula. Angkutan yang ada pada masa lampau sulit didapatkan. Itupun sangat terbatas jumlahnya. Syukurlah sekarang sudah ada jalan menuju Danau Batur yang bisa dilalui kendaraan bermotor dan sebagian sudah diaspal. Kesulitan lain yang mereka harus hadapi di daerah Batur ialah masalah air. Walaupun sekarang sudah ada bantuan Pemerintah, tetapi kadang-kadang masih dirasakan adanya kekurangan air terutama di musim kemarau.

Betapun aneka kesulitan yang mereka harus hadapi, masyarakat Desa Batur tetap menyertai (*ngiring*) Ida Betari Dewi Danu, patuh melaksanakan tugas serta kewajibannya, sampai sekarang. Oleh karena itu tidak mengherankan bila keadaan Pura Ulun Danu Batur/Pura Batur yang ada di Batur dalam keadaan terpelihara. Perbaikan-perbaikan terus diadakan, *aci-aci* berjalan sebagaimana mestinya dan peralatan upacara terpelihara dengan baik. Satu hal yang tidak kalah pentingnya dan menjadi kunci keberhasilan Jero Gede Mekalihan serta masyarakat Desa Batur dalam melaksanakan tugasnya ialah ketaatan para anggota subak untuk menghaturkan *sarin tahun*, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *Raja Purana* Pura Batur. Kelalaian para anggota subak menjadi kewajiban Jero Gede Makalihan untuk mengingatkannya. Pada masa lampau hal inipun menjadi masalah karena terbatasnya kendaraan serta jarak yang harus ditempuh, cukup jauh.

Perlu dicatat bahwa untuk memindahkan Pura Ulun Danu Batur ke Kalanganyar, Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa di Bali aktif berperan membantu masyarakat dengan mengerahkan *bogolan* (narapidana) untuk ikut mengangkut bangunan serta pelinggih yang dibongkar dan peralatan upacara yang bisa diselamatkan. Dengan demikian banyak bahan-bahan yang bisa diselamatkan untuk membangun kembali Pura Ulun Danu Batur di Kalanganyar (tempat baru/*anyar*).

Salah satu bahan bangunan yang masih asli terutama berupa kayu penuh ukiran serta berlapis air emas (*maperada*), yang dapat disaksikan sampai sekarang ialah bangunan berupa *pasamuhan agung/gedong* yang terletak di halaman *jrowan* Pura (ruang utama pura), berdiri dengan megahnya. Rupanya ada beberapa pelinggih/pura yang tidak bisa dipindahkan ke daerah Kalanganyar, terutama yang erat hubungannya dengan permohonan air suci (*tirtha*) yang ada di danau Batur. Oleh karena itu pelinggih/pura tersebut perlu dibangun kembali di sekitar danau Batur. Sampai sekarang yang sudah bisa di bangun agak memadai ialah Pura Jati dan Pura di Tirtha Bungkah. Pembangunan pura memang terus dilakukan, walaupun demikian kuantitas dan kualitas kesakralannya agar terus diusahakan. Masih ada beberapa yang perlu dibangun disekitar Danau Batur, misalnya: di Pelisan Pura Pasar Agung, di Tirtha Mas Mampeh dan lain-lainnya. Sedangkan Pura Penataran Agung yang merupakan Pura Induk dari Pura Ulun Danu Batur tetap berlokasi di daerah Kalanganyar (disebut Batur), walaupun beberapa pelinggih masih perlu disempurnakan. Akhirnya sebagai catatan perlu diketahui bahwa Pura Ulun Danu Batur yang berlokasi di Kalanganyar dapat pula disebut Pura Penataran Agung Batur. Hal ini dapat dibandingkan dengan Pura Sad Kayangan yang ada di Besakih, yang umum disebut Pura Besakih adalah Pura Penataran Agung Besakih tempat berdirinya tiga buah Padmasana, pada hal Pura Besakih terdiri dari 22 buah Pura, sedangkan Pura Ulun Danu Batur yang dipindahkan ke daerah Kalanganyar terdiri dari 11 buah Pura.

Desa Batur yang terletak di Kecamatan Kintamani adalah desa berusia relatif baru terhitung sejak berdirinya, yaitu pada tahun 1926. Penduduknya merupakan perpindahan dari Desa Batur lama terletak disebelah Barat lereng gunung Batur. Sebelum masa pemerintahan Dalem Waturenggong di Bali, Desa Batur bernama desa *Sinarata* dan Pura *Ulun Danu Batur* bernama Pura *Tampurhyang*. Kemudian dalam masa pemerintahan Dalem Waturenggong di Bali pada tahun

1460 – 1550 Masehi. Dalem Waturenggong mengganti nama Pura *Tampurhyang* yang merupakan *linggih Bhatara Dewi Danuh* atau *Bhatari Ulun Danu* menjadi pura Batur dan desanya menjadi Desa Batur.

Pada tahun *Caka* 1534 (1612 Masehi) gunung Batur meletus dan menghujani desa *Sinarata* dengan batu serta serpihan material gunung, sehingga menimbulkan kerusakan luar biasa di mana-mana. Kemudian pada tahun *Caka* 1622 (1700 Masehi) banyak rumah-rumah warga di desa *Sinarata* terbakar terkena semburan api dan hawa panas yang turun dari kawah gunung yang menggelegar memuntahkan aneka material. Kembali pada tahun *Caka* 1706 (1784 Masehi) gunung Batur mengeluarkan lahar panas yang mengalir ke danau Batur, di samping banyak rumah penduduk yang hanyut terbawa lahar banyak pula penduduk yang meninggal dan pada waktu itu muncul gunung kecil baru di gunung Batur.

Pada tanggal 3 Agustus 1926, gunung Batur kembali mengeluarkan lahar panas dan melanda Desa Batur serta Pura *Tampurhyang* hingga rata dengan tanah. Dalam usahanya menyelamatkan diri, warga Desa Batur mengungsi ke *Karanganyar* yaitu sebuah desa di sebelah Selatan desa Kintamani dan sebagian lagi mengungsi ke desa *Bayung Gede*. Berkat bantuan pemerintah Hindia-Belanda dan desa-desa lainnya yang berdomisili di seputar Desa Kintamani, beberapa benda seperti *Gong Gede*, *Semar Kirang*, *Bale Pelinggih*, *Tombak*, *Lerontek* dan *Pralingga Ida Bhatara* saat itu dapat diselamatkan.

Setelah mengungsi di desa Bayung Gede, penduduk Batur membangun Desa Batur di Karang Anyar dan berangsur-angsur membangun Pura lengkap. Desa Batur baru yang mengambil tempat di Karang Anyar diberi nama seperti nama desa dan pura asalnya yaitu Desa Batur dan pura Batur, yang sekarang dikenal dengan nama Pura *Ulun Danu Batur*. Saat ini Desa Batur terdiri dari tiga desa administratif atau dinas yaitu: Desa Batur Utara, Desa Batur Selatan dan Desa Batur Tengah.

Letusan gunung Batur yang cukup dahsyat yang terjadi pada tahun 1926 M, menyebabkan Pura Ulun Danu Batur yang ada di *madianing* gunung Batur dipindahkan ke daerah Kalanganyar dekat Kintamani. Mengingat masyarakat Desa Batur mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga dan menyelenggarakan *aci* (*upacara korban suci*) di Pura Ulun Danu Batur, maka mereka ikut dipindahkan ke daerah Kalanganyar. Meskipun daerah Kalanganyar menjadi tempat dibangunnya kembali Pura Ulun Danu Batur dan karena masyarakat yang menempati berasal dari Desa Batur, maka daerah kalanganyar disebut pula Desa Batur.

b) Sejarah Pura Ulun Danu Batur

Menurut lontar *Purana Bangsul*, Desa Batur disebutkan danau pertama yang dibuat oleh Ida Sang Hyang Widhi adalah danau Batur, yang kemudian dikenal menjadi danau terbesar di pulau Bali. Danau yang posisinya secara tradisional terletak di Lingga Yoni Ida Bhatari Danu (tepat sekali berada di wilayah kesuburan dari Bhatari Danu). Dalam keyakinan Hindu, dan yang diyakini oleh masyarakat Batur, adalah gunung Batur menjadi lingga Siwa dan Segara Danu Batur adalah Yoni. Pertemuan lingga gunung Batur dengan Yoni Segara Danu Batur menciptakan kesuburan yang luar biasa di muka bumi ini (*Bali Dwipa*). Dalam memohon anugerah kemurahan Ida Sang Hyang Widhi, maka gunung Batur dan danau Batur adalah sarananya. Pada hari-hari yang telah ditentukan di kedua tempat ini, di kepundan gunung Batur dan di tengah danau batur dipersembahkan kurban suci (*upacara pakelem ke gunung dan ka danu*).

Sumber-sumber penting lainnya yang menyebutkan tentang Pura Ulun Batur adalah *Lontar Kusuma Dewa*, *Lontar Usana Bali* dan *Lontar Raja Purana Batur*. Angka tahun yang pasti menyebutkan tentang pendirian Pura Batur tidak ada. Melihat banyaknya *peinggih-peinggih*

serta luasnya kompleks pura, maka dapat diduga bahwa Pura *Batur* adalah Pura *Penyiwian* Raja-raja yang berkuasa di Bali, yang sekaligus pula merupakan *Kahyangan Jagat* Bali. Adapun yang distanakan di Pura Batur adalah *Dewi Danuh*, seperti yang disebutkan dalam *Lontar Usana Bali*. Dalam *Lontar* itu ada disebutkan yaitu: pada bulan *margasira* (bulan kelima) waktu *kresna paksa* (tilem), tersebutlah *Bhatara Pasupati* di India sedang memindahkan puncak Gunung Mahameru yang dibagi menjadi dua dipegang dengan tangan kiri dan kanan. Puncak gunung itu lalu dibawa ke Bali digunakan sebagai *sthana* putra beliau yaitu *Bhatara Putrajaya* dan *Bhatari Danuh*. Puncak gunung yang dibawa dengan tangan kanan menjadi gunung *Toh Langkir* (gunung Agung) sebagai *sthana Bhatara Putrajaya* dan puncak gunung yang dibawa dengan tangan kiri menjadi Gunung Batur sebagai *sthana Bhatari Dewi Danuh* dan keduanya itu sebagai hulunya pulau Bali. Kedua gunung tersebut melambangkan unsur *Purusa* dan *Pradana* dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Dalam *naskah Purana Bali* juga disebutkan bahwa Danau Batur merupakan *stana Dewi Uma*, Danau Buyan merupakan *stana Dewi Gangga*, Danau Beratan tempat berstananya *Dewi Laksmi* dan *Danau Tamblingan* merupakan *stana Dewi Sri*.

Dalam *Babad Batur* disebutkan bahwa penguasa Majapahit, setelah berhasil menaklukkan Bali telah menempatkan penguasa di Desa Batur. Dalam sumber ini disebut-sebut Dalem Ketut sebagai pelaksana penempatan pejabat itu. Penempatan itu berkaitan dengan penyucian beberapa tempat pemujaan seperti gunung Agung, Pura Batur, Batukaru, Saderi, dan yang lainnya. Melalui sumber ini dapat diperoleh petunjuk bahwa Pura Batur telah mendapat perhatian utama dari Dalem Ketut sebagai penguasa Bali yang berkedudukan di Gelgel. Bali dikuasai oleh Majapahit tahun 1343, setelah ekspedisi Gajah Mada berhasil menguasai pusat kerajaan Bedahulu. Dalem Ketut sebagai Raja Bali ke-3 dari dinasti Kresna Kepakisan memerintah Bali atas nama Raja Majapahit, mulai berkuasa sekitar tahun 1380-an sampai tahun 1460. Beliau kemudian diganti oleh putranya bergelar Dalem Waturenggong. Jadi, sumber ini telah memberi petunjuk bahwa pura Batur yang disungung oleh penduduk Desa Batur dan sekitarnya, telah memperoleh perhatian dari penguasa Bali yang baru.

Catatan sejarah dalam lontar-lontar dan buku-buku sejarah serta bukti-bukti fisik yang masih dapat disaksikan, ada beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan keberadaan pura, desa, dan gunung Batur di Kintamani hingga keberadaannya sekarang ini.

- (a) Sejak tahun 11 *Caka* (89 Masehi), gunung-gunung dan danau-danau di Bali merupakan tempat suci atau tempat pemujaan, ini disebabkan semakin kuatnya pengaruh agama Hindu di Bali dan semakin kuatnya pula tatanan kehidupan yang berpegangan pada konsepsi agama Hindu. Tatanan Hindu juga berdampak baik kepada masyarakat Bali dan Bali dari hari ke hari semakin aman dan sejahtera.
- (b) Pada tahun 1500 Masehi oleh Dalem Waturenggong desa *Sinarata* dan Pura *Tampurhyang* diganti namanya menjadi Desa Batur dan Pura Batur. Desa *Sinarata* atau Desa Batur dan Pura *Tampurhyang* atau Pura Batur terletak di lereng gunung Batur sebelah Barat.
- (c) Pada tahun 1599 Masehi berjangkit penyakit lepra di seluruh Bali, termasuk desa *Sinarata* atau Desa Batur. Banyak orang yang meninggal, hal ini berpengaruh kepada pemeliharaan pura yang terbengkalai.
- (d) Pada tahun 1612 Masehi gunung Batur meletus sangat dasyat. Gunung Batur banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan termasuk kerusakan Pura *Tampurhyang* atau Pura Batur.
- (e) Pada tahun 1700 Masehi turunnya lahar panas dari gunung Batur. Lahar panas tersebut menyebabkan Pura Batur tertimbun.
- (f) Pada tahun 1784 Masehi gunung Batur meletus lagi, akibatnya banyak penduduk yang tewas dan banyak pula Pura yang rusak.

- (g) Dalam hasil penelitian Zollinger, dapat diketahui bahwa dalam tahun 1850-an Pura Batur sudah merupakan Pura pemujaan yang besar yang terletak di Desa Batur, di lembah kaldera Gunung Batur.
- (h) Dalam artikel R. Van Eck seorang budayawan Belanda tentang Bali tahun 1879, melukiskan Pura Batur sebagai Pura besar yang terletak di tengah-tengah Desa Batur, dilembah kaldera Gunung Batur. Disebutkannya pula bahwa Pura Batur adalah tempat pemujaan kepada *Dewi Danu* yang dapat disamakan dengan pemujaan *Dewi Gangga* di India.
- (i) Dalam artikel yang berjudul “Kenang-kenangan dari India Timur Bali” yang ditulis oleh C.M. Pleyte seorang ahli ilmu bumi, melukiskan lebih teliti pengalaman perjalanan ke Pura Batur. Dipaparkannya Pura Batur sebagai pura besar dan keramat, penuh dengan meru dan bangunan kecil lainnya. Di tengah-tengah kompleks pura yang suci, terdapat bangunan pemujaan orang-orang Cina. Dari berita ini dapat diketahui bahwa dalam tahun 1901 ketika pura masih berlokasi di lembah, sudah terdapat pemujaan orang Cina di tengah pelataran yang suci. Jadi pemujaan orang Cina yang disebut *pelinggih Ratu Subandar* di Pura Batur sekarang sudah ada dalam abad XIX. Hal ini merupakan bukti toleransi religi yang berderajat tinggi, yang telah terjadi di Pura Batur.
- (j) Pada tanggal 21 Januari 1917 dan 4 Februari 1917 Masehi terjadi gempa bumi yang dasyat. Daerah yang mengalami kerusakan berat yaitu distrik Kintamani, Bangli, Susut, Desa Batur, Songan, dan Buahman menderita kerusakan parah. Gempa ini menyebabkan banyak penduduk yang tewas, rumah dan pura rusak parah.
- (k) Pada tanggal 3 Agustus 1926 gunung Batur meletus. Desa Batur dan Pura Batur rata dengan tanah tertimbun lahar. Penduduk Desa Batur mengungsi ke sebelah Selatan Kintamani. Tempat itu disebut *Kalang Ayar* atau *Karang Anyar* atau tempat baru. Selanjutnya penduduk Desa Batur mendirikan desa dan pura yang baru yang diberi nama Desa Batur dan Pura Batur. Penjelasan di atas menyatakan Pura Batur pada mulanya bernama Pura *Tampurhyang* dan terletak di kaki Gunung Batur. Bersamaan dengan pindahnya penduduk Desa *Sinarata* atau Desa Batur ke *Kalang Anyar*, maka penduduk juga membuat pura dengan nama Pura Batur.

c) Bangunan-Bangunan Suci di Pura Ulun Danu Batur

Adapun pura-pura yang termasuk Pura Ulun Danu Batur yang pada mulanya berlokasi di Desa Batur ialah :

(a) Penataran Pura Jati

Yang menjadi pusat pemujaan adalah *Ida Bhatara Pujangga Luwih*, berkedudukan sebagai *bhagawanta*. Kehadapan Beliau dimohon Tirtha pemuput Karya yaitu penyelesaian terhadap upacara.

(b) Pura Tirtha Bungkah

Pura ini merupakan tempat pemujaan *Ida Ratu Ayu Manik Bungkah* sebagai penguasa sumber air panas yang ada dekat pura tersebut. Sumber air panas ini disebut *Tirtha Bungkah* dan diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Dewasa ini air panas *Tirtha Bungkah* banyak dikunjungi apalagi adanya jalan aspal menuju tempat tersebut. Tidak mengherankan banyak penginapan serta rumah makan yang didirikan.

(c) Pura Taman Sari

Di Pura ini dipuja Ida Betara *Sesuhunan Sakti Mekalihan* sebagai penguasa dan memberi kekuatan hidup terhadap *pala bungkah* (umbi-umbian), *pala gantung* (buah-buahan) serta jenis palawija lainnya yang ditanam di ladang (tegalan), misalnya: bawang merah, bawang putih, ketela, kacang-kacangan, dan sebagainya. Istilah Betara Sesuhunan Sakti Mekalihan dapat kiranya disamakan dengan pengertian *ardanareswari* atau *pradana-Purusa*, dalam konsepsi Hindu selanjutnya.

(d) Pura Tirtha Mas Mampoh

Tempat ini merupakan *patirthan* Ida Betara-Betari *Mekalihan* dan tempat mohon tirtha untuk memberi kekuatan hidup kepada *sarwa meletik* yaitu tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan biji/buah serta tunas, misalnya kelapa, padi, jagung, kayu manis, fanili, dan sebagainya.

(e) Pura Jaba Kuta

Pura ini tempat memuja Ida Betara *Bagus Wayan* dan Ida Betara *Bagus Tengah*, yang berfungsi menyelesaikan Upacara *Dewa Yadnya* dan *Manusa Yadnya* yang diselenggarakan di pura-pura dan di perumahan. Orang yang menjadi *Jan Banggulatau tatakan* Ida Betara di Pura ini disebut dengan gelar *Jero Balian*. Jabatan ini agak khusus karena dijabat oleh wanita yang belum kawin dan selamanya tidak boleh kawin (*nyukla brahma cari*). Bila mereka melanggar diyakini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya, misalnya sakit tidak bisa disembuhkan atau meninggal dunia.

(f) Pura Sampian Wangi

Pura ini merupakan pelinggih Ida Ayu Ratu *Pengeringgitan*. Beliau dipuja untuk mendapatkan *taksu* dan keahlian di bidang keterampilan, misalnya : menenun, merangkai janur (*mejahitan*), jarit-menjarit, membuat jajan, dan sebagainya. Masyarakat Bali sangat meyakini bahwa dengan dimilikinya (*ngelah*) *taksu*, hasil keterampilannya akan disukai dikagumi orang banyak sehingga akan laku bila hendak dijual.

(g) Pura Gunarali

Pura ini merupakan pelinggih Ida Ratu *Ketut Gunarali*. Beliau berfungsi memberi kekuatan serta dorongan terhadap pengembangan bakat para remaja (*teruna bunga dan deha bunga*). Dengan demikian diharapkan mereka bisa mengabdikan sesuai dengan bakatnya.

(h) Pura Padang Sila

Pura ini hanya merupakan tempat *mesandekan* Ida Betara-betari yang ada di Pura Ulun Danu Batur. Di sini ada 45 buah pelinggih yang semuanya *mertiwi* yaitu tidak menggunakan bahan kayu ataupun beratap, melainkan hanya berupa gundukan tanah/batu.

(i) Pura Penataran Agung Batur

Pura ini merupakan pura induk karena di sini terdapat palinggih-palinggih utama seperti berikut:

- (1) Sebuah *meru tumpang* sebelas (11), tempat memuja Ida Betari Dewi Danu yang sering pula disebut Ida Betari Ulun Danu.
- (2) *Meru tumpang* sembilan (9) ada 3 buah. Sebagai tempat memuja Ida Betara *Sesuhunan Sakti Ngambel Jagat*, Ida Betara *Gede Gunung Agung*, dan Ida Betara *Dalem*

Waturenggong. Menurut Raja Purana Pura Batur, *meru tumpang* 9 ada 6 buah; Tiga (3) buah diantaranya belum dibangun yaitu tempat memuja *Ida Betara Gede Bedauh*, *Ida Ratu Ngurah Balingkang*, dan *Ida Ratu Gede Gurun*.

- (3) *Meru tumpang pitu* (7) ada 2 buah yaitu tempat memuja *Ida Ratu Ayu Manik Astagina*, merupakan *amongan* (beban tanggungan) raja Mengwi, dan sebuah lagi merupakan *amongan* Puri Nyalian.
- (4) *Meru tumpang lima* (5) ada satu buah, merupakan *amongan* dari puri Belahbatuh.
- (5) *Meru tumpang tiga* (3) ada tiga buah; Semuanya menjadi *amongan* desa Tejakula-Kabupaten Buleleng.
- (6) Satu buah gedong merupakan tempat memuja *Ida Ratu Ayu Subandar*. Beliau dipuja sebagai penguasa di bidang usaha/ ekonomi.
- (7) *Pesamuhan Agung* yang berupa *gedong* yang tinggi, merupakan tempat *pratima* (perwujudan) *Ida Betara-Betari* pada waktu diselenggarakan upacara besar seperti *Usaba Desa*, *Manca Wali Krama*, dan sebagainya.
- (8) Sebuah *Meru Tumpang Telu* (3) tempat memuja *Ida Ratu Ayu Kentel Gumi*.

Bangunan *Ida Ratu Ayu Kentel Gumi* dipuja sebagai penguasa serta pengendali hama terutama berupa *wereng*, *ludus*, *walangsangit*, *tikus*, *candang*, dan *burung*. Di antara jenis hama itu yang dianggap paling sukar ditanggulangi adalah *ludus* dan *candang*. *Ludus* ialah sejenis hama yang menyebabkan pembusukan pada batang, sedangkan *candang* berupa kemandulan pada tanaman (tidak mau berbuah) walaupun tumbuhnya subur dan berbunga lebat.

Selain bangunan *palinggih* yang telah disebutkan di atas masih terdapat sejumlah *palinggih* pendamping dan bangunan pelengkap. Dari uraian di atas, ternyata yang menonjol peranannya adalah unsur *pradana*. Hal ini dapat dilihat dari *palinggih* utama yaitu berupa *meru tumpang* sebelas (11) menjadi tempat pemujaan *Ida Betari Dewi Danu*, demikian juga nama-nama yang digunakan lebih banyak menunjukkan nama *sanggre* perempuan (unsur *pradana*). Hal ini berlawanan dengan Pura Besakih; yang dominan di Pura Besakih adalah unsur *Purusa*, mengingat nama-nama yang digunakan lebih banyak menggunakan nama *sanggre* laki-laki dan yang menjadi pusat pemujaan adalah *Sang Hyang Tri Purusa (Siwa, Sadha, partama Siwa)* yang dikalangan masyarakat luas disebut *Ida Betara* di Gunung Agung atau *Ida Betara Tohlangkir*. Bangunan tempat memuja beliau berupa tiga (3) buah *Padmasana*. Selain tiga buah *Padmasana* terdapat pula sejumlah *palinggih* yang tersebar pada 22 buah pura.

Rupanya, pengertian Pura Ulun Danu Batur yang ada di Desa Batur (sekarang di Kalanganyar) dapat disamakan dengan pengertian Pura Besakih yaitu suatu kumpulan pura, hanya nama dan jumlah yang berbeda; Pura Besakih terdiri dari 22 buah Pura sedangkan Pura Ulun Danu Batur yang ada di Desa Batur Kalanganyar terdiri dari 9 buah pura. Perlu diingat bahwa Pura Penataran Agung Batur ternyata merupakan salah satu pura di antara 9 buah pura yang ada di Pura Ulun Danu Batur Kalanganyar. Demikian pula halnya Pura Penataran Agung Besakih merupakan salah satu pura di antara 22 buah pura yang ada di Besakih.

d) Geografis Desa Batur Kintamani

Monografi desa tahun 2009, Desa Batur menyebutkan secara geografi Desa Batur terletak di sebelah selatan Desa Kintamani kurang lebih 27 kilometer dari ibu kota Kabupaten Bangli, atau kurang lebih 65 kilometer dari kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Pura *Ulun Danu Batur* sendiri terletak di Desa Batur Selatan. Desa Batur merupakan bagian dari kesatuan administratif Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: desa Kintamani
Sebelah Selatan	: desa Sekardadi
Sebelah Barat	: desa Bayung Gede
Sebelah Timur	: desa Songan

Desa Batur dibagi dalam tiga kewilayahan desa administratif atau dinas, yaitu Batur Utara, Batur Tengah, dan Batur Selatan, yang dikepalai oleh seorang kepala desa atau *perbekel*. Pada setiap *banjar*, kepala desa dibantu oleh *kelian dinas*. Kepala desa dan *Kelian dinas* mempunyai tugas yang bersangkutan dengan kedinasan seperti kartu penduduk, surat keterangan, keamanan, ketertiban, dan hal-hal yang bersifat kedinasan lainnya.

Desa Batur terletak pada ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut, disebuah dataran yang relatif sempit kurang lebih 1 x 5 kilometer di pinggiran jurang kaldera Gunung Batur. Di sebelah timur, terletak Gunung Batur dengan tinggi 1717 meter dari permukaan laut.

Ditilik dari morfologi geografis, Desa Batur terletak pada salah satu perbukitan yang melingkar di daerah Kintamani. Desa Batur dan Pura *Ulun Danu Batur* seolah-olah terletak pada sebuah punggung kuda (*tundun jaran*), karena dikiri-kanannya terdapat jurang yang terjal, terlebih pada bagian yang menghadap ke gunung Batur. Demikian juga, Desa Batur adalah sebuah desa berposisi pada bukit yang sempit. Karena letak dan luasnya yang sempit, pemukiman penduduk dan perumahan penduduk diperkenankan merapat dengan komplek Pura *Ulun Danu Batur*. Hal ini menyebabkan antara pemukiman penduduk dengan areal suci di Pura *Ulun Danu Batur* tidak menerapkan aturan batas yang ketat seperti lazimnya di areal Pura *Sad Kahyangan* lainnya di Bali.

e) Keadaan Penduduk Desa Batur

Penduduk Desa Batur merupakan *pengemong*, *pengempon*, dan sekalian *penyivi* Pura *Ulun Danu Batur*, yang serta-merta erat hubungannya dengan pengayoman, pemeliharaan dan upacara yang terkait dengan Pura *Ulun Danu Batur*. Pemaparan keadaan penduduk Desa Batur berikut ini menjelaskan secara ringkas keadaan penduduk dari gambaran perumahan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat Batur.

(a) Bidang Perumahan

Keadaan perumahan di Desa Batur tidak banyak mengikuti tata letak perumahan tradisional Bali pada umumnya, hal ini disebabkan karena tanah pemukiman di Desa Batur yang sangat sempit. Pembagian tanah tempat tinggal di Kalanganyar atas seijin pemerintah Belanda yang berkuasa dengan ketentuan: 1) yang *ngayah* (mengabdikan) mendapat tanah 3 are, 2) masyarakat yang sudah menduda mendapat tanah 1,5 are. Kondisi ini menyebabkan penduduk tidak dapat menuruti konsep *Tri Hita Karana* maupun *Asta Kosala Kosali* secara tepat. Rumah-rumah penduduk di Desa Batur sebagian besar masih merupakan rumah dengan arsitektur jaman dahulu yang sudah tidak memadai karena sudah tua, namun ada pula rumah-rumah yang dibangun sudah dengan arsitektur modern seperti sekarang. Melihat kondisi perumahan di Desa Batur terdapat rumah semi permanen, rumah permanen dan rumah yang tergolong rumah mewah.

(b) Bidang Pendidikan

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Di Desa Batur terdapat enam buah Sekolah Dasar yang dilengkapi dengan ruang belajar, ruang perpustakaan, kantor sekolah dan perumahan untuk guru. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terdekat dengan Desa Batur terdapat di Desa Kintamani dan Desa Bayung Gede, serta Sekolah

Menengah Umum (SMA) terdapat di desa Bayung Gedepula. Daya tampung sekolah baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama maupun Sekolah Menengah Umum walaupun jumlahnya terbatas akan tetapi masih dapat menampung usia didik dan kebutuhan warga Desa Batur dalam bidang pendidikan. Jarak desa Kintamani kurang lebih 1 kilometer dari Desa Batur, sedangkan jarak desa Bayung Gede dari Desa Batur kurang lebih 3 kilometer. Karena di Desa Batur belum terdapat Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi, maka bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Menengah Kejuruan atau Perguruan Tinggi harus merantau ke ibu kota kabupaten atau ke kabupaten-kabupaten di provinsi Bali. Tercatat pula sejumlah warga Desa Batur yang melanjutkan pendidikan di sejumlah provinsi di Indonesia.

(c) Bidang Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Desa Batur masih minim atau kurang. Balai pengobatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pembantu belum ada di Desa Batur. Penduduk yang ingin berobat ke Puskesmas harus pergi menuju desa Kintamani yang jaraknya tidak jauh dari Desa Batur atau mereka akan pergi ke klinik-klinik kesehatan di desa Bayung Gede. Bagi mereka yang menderita penyakit cukup berat atau serius biasanya dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Kabupaten Bangli.

(d) Bidang Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Desa Batur dapat secara umum ada pada empat bidang utama sumber kehidupan, yaitu pertanian, peternakan, kerajinan, dan pariwisata, yang masing bidang atau sektor itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

(e) Bidang Pertanian

Luas tanah pertanian di daerah Desa Batur berupa tanah tegalan seluas 1.244.484 Hektar. Tanah pertanian ini sebagian ditanami jeruk (kurang lebih 240 Hektar), kebun kopi seluas 56,17 Hektar. Di samping kopi dan jeruk tanah pertanian di kawasan Desa Batur ditanami aneka budi daya pertanian seperti: jagung, sayur-sayuran, dan palawija. Buah jeruk hasil budi daya masyarakat Desa Batur sudah terkenal di seluruh Bali, hingga ke pulau seberang semisal Jawa. Jeruk budi daya masyarakat Desa Batur memiliki kekhasan dengan warna kuning segar dan rasa harum dan manis. Kini perkebunan sayur-mayur masyarakat Desa Batur semakin berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan dan menjamurnya restoran dan hotel di daerah Batur. Walaupun hotel dan restoran di daerah Batur menjadi pangsa pasar utama produksi pertanian masyarakat Desa Batur akan tetapi produksinya yang berlebih sehingga penjualannya menembus kota dan kabupaten terutama kota besar kota Denpasar dan Bali pada umumnya.

(f) Bidang Peternakan

Mata pencaharian bidang peternakan di Desa Batur merupakan kegiatan sampingan atau sambilan. Sejumlah penduduk Desa Batur memelihara hewan ternak seperti; sapi, ayam ras dan buras (ayam kampung) serta babi. Para petani sebagian besar berternak sapi, karena kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman pertanian. Ayam ras, ayam kampung dan babi dipelihara untuk meningkatkan penghasilan, jumlah ayam kampung yang dipelihara sekitar 15.000 ekor, ayam ras sekitar 10.000 ekor sedangkan babi sekitar 1000 ekor. Berdasarkan kepercayaan yang tidak mungkin dilanggar adalah pantang bagi penduduk Desa Batur memelihara kuda. Kuda hanya boleh dipelihara adalah kuda putih mulus, itupun hanya menjadi peliharaan ia yang amat dituakan di Desa Batur, yaitu Jro Gde Alitan dan Jro Gde Duuran.

(g) Bidang Kerajinan

Kerajinan hasil kreativitas seni masyarakat Desa Batur yang menonjol adalah kerajinan tangan merajut. Hasil rajutan yang dihasilkan meliputi: kain selendang, topi, taplak meja, kaos kaki dan lainnya. Jumlah pengerajin rajut sekitar 350 orang semuanya terdiri dari kaum ibu-ibu. Belakangan perkembangan seni merajut sebagai usaha rumah tangga yang mandiri di Desa Batur semakin berkurang. Boleh dikatakan, bahwa semua pengerajin bekerja sebagai tenaga upahan yang dibayar pengepul. Motif-motif rajutan belum berkembang secara optimal. Motif rajutannya biasanya yang dibuat berupa bunga, huruf, dan bintang-bintangan.

(h) Bidang Pariwisata

Pendukung industri pariwisata yang berkembang di Desa Batur cukup beragam, seperti restoran bertaraf internasional, restoran kecil, penginapan, alat transportasi, dan biro perjalanan. Di samping itu ada pula yang melakoni profesi sebagai pedagang asongan atau pedagang acung.

Restoran dan hotel bertaraf internasional sebgaaian besar dimiliki oleh pengusaha di luar Bangli atau di luar Batur, hanya sebagian kecil dimiliki oleh penduduk asli Desa Batur. Pedagang kecil, restoran kecil, pekerja restoran atau hotel banyak yang berasal dari Desa Batur. Menilik dari geliat kepariwisataan di Desa Batur, dapat dinyatakan bahwa industri pariwisata besar kontribusinya untuk meningkatkan pendapatan penduduk Desa Batur. Secara umum rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat Desa Batur termasuk katagori sedang. Dengan keberadaan geris ekonomi inilah, masyarakat Desa Batur dapat menjalankan tugasnya sebagai *penyiwi Pura Ulun Danu Batur*, dengan aneka bentuk dan jenis upacara yang harus dilaksanakan.

f) Bentuk-Bentuk Tradisi Bernilai Karakter Bangsa

Era global telah menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menyebabkan dunia ini seakan-akan tanpa batas (*border less*). Dalam konteks ini nilai-nilai baru seperti demokratisasi dan HAM (Hak Azasi Manusia) semakin sering diwacanakan. Nilai-nilai individualisme dan materialisme juga semakin menonjol di era global ini. Globalisasi cenderung menyebabkan terjadinya kesamaan (homogenitas) budaya.

Ciri-ciri globalisasi yang disebutkan di atas sesungguhnya berlawanan atau bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme seperti tercermin dalam moto *Bhineka Tunggal Ika*. Sebagaimana diketahui bahwa karakter bangsa Indonesia adalah sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yakni masyarakat yang berke-Tuhanan, berperikemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan mengedepankan nilai keadilan. Kebersamaan (mutualisme), gotong-royong, dan persaudaraan (*brotherhood*) merupakan karakter bangsa Indonesia yang sejak lama telah tumbuh dalam kehidupan di nusantara ini (Swasono, 2010).

Karakter bangsa Indonesia seperti dipaparkan di atas, belakangan ini semakin memprihatinkan. Konflik antar etnik ataupun sesama warga sering terjadi. Fenomena ini sudah tentu menyiratkan bahwa persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa semakin rapuh. Di sisi lain individualisme di masyarakat semakin menonjol sehingga kebersamaan, gotong-royong, dan nilai-nilai kekeluargaan dapat dikatakan semakin menipis. Dengan kata lain, globalisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ataupun merubah karakter bangsa Indonesia.

Globalisasi juga ditengarai dapat menimbulkan semacam penolakan (*counter trend*) terhadap homogenitas budaya sehingga muncul hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa sendiri (Naisbitt dan Aburdene, 1990, 107; Ritzer, 2006). Dengan demikian maka

penolakan terhadap homogenitas budaya ini akan cenderung mempertahankan heterogenitas atau pluralitas budaya. Dalam konteks ini sesungguhnya terjadi pergulatan ideologi antara nilai-nilai global dan lokal yang dapat memunculkan glokalisasi yaitu kombinasi atau perpaduan nilai-nilai global dan lokal. Dengan demikian, globalisasi merupakan sebuah paradoks yakni cenderung menimbulkan homogenitas budaya, dan di sisi lain terjadi pula penguatan budaya lokal sehingga dapat mempertahankan kelokalan atau heterogenitasnya. Dalam konteks ini tradisi *Matiti Suara* di Desa Batur, Kintamani dapat dikatakan sebagai tradisi atau kearifan lokal yang relevan dengan upaya pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan oleh pemerintah. *Matiti Suara* sebagai kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab perlu dikaji lebih lanjut untuk dilestarikan dan diimplementasikan di masyarakat sebagai sebuah upaya atau gerakan anti korupsi.

Dalam rangka mempertahankan karakter bangsa di era global sekarang ini, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesungguhnya telah menetapkan Rencana Induk (*grand design*) Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa. Sejumlah ahli juga telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang pendidikan karakter bangsa Indonesia di tengah-tengah era global ini (Nurokhim; Wong, 2007; Rajasa, 2009, Sudrajat, 2010).

Karakter bangsa merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, dan budaya (Sudrajat, 2010: 3). Karakter bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang diterima dan dijadikan acuan sejak ratusan tahun di bumi Nusantara ini.

Mpu Tantular pada abad ke 14 telah mengangkat *Bhineka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa* dalam karyanya, yang menyiratkan nilai-nilai keragaman dalam sistem kepercayaan atau keagamaan yang tumbuh di masyarakat pada saat itu. Pada awal abad ke 20, berdiri Budi Utomo dengan ideologi nasionalisme, yang bertujuan untuk menyatukan seluruh nusantara ini. Selanjutnya sumpah pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda dari berbagai daerah di seluruh Indonesia merupakan pengejawantahan nilai-nilai *Bhineka Tunggal Ika* dengan menyatakan bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia.

Keinginan bersatu untuk melepaskan diri dari penjajahan akhirnya berhasil diwujudkan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karakter bangsa Indonesia tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai dari masing-masing sila dalam Pancasila (Wong, 2007: 12; Angkasa, 2010).

Seperti telah disinggung di depan, bahwa belakangan ini karakter bangsa Indonesia mengalami distorsi di masyarakat. Konflik terjadi di berbagai daerah, bahkan ada daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ini berarti bahwa persatuan Indonesia mengalami kemunduran. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dikalahkan oleh sifat individualism yang merupakan representasi dari globalisasi. Kekerasan dan ketidakadilan terjadi di mana-mana, dan nilai-nilai kemanusiaan semakin menipis.

Beberapa pemikir menyatakan bahwa manusia kontemporer menunjukkan sifat-sifat yang paradoks. Di satu sisi manusia bersifat afirmatif, namun di sisi lain mereka skeptis. Manusia postmodern bersifat dekonstruktif dan konstruktif, atau bersifat konstruktif dengan memiliki kode ganda. Amir Piliang (2006: 13-20) menyatakan bahwa manusia postmodern bersifat sebagai *homo minimalis* (dekonstruktif dan menolak setiap kategori relativisme) dan *homo pluralis* (menghargai pluralism). *Homo minimalis* merupakan fenomena psikis pada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan diri minimal perspektif dan visi. Para minimalis mempunyai dorongan hasrat yang kuat untuk tetap *survive* dan eksis, meskipun mereka dalam kondisi minimalitas keterampilan, perspektif, dan pandangan. *Homo minimalis* ini dicirikan pula oleh sifat ironis,

skizofrenik, dan fatalis. Manusia ironis mempunyai sifat-sifat inkonsistensi, berlebihan, janggal, kontradiktif, dan abnormalis. Sifat-sifat *skizofrenik* pada seseorang ditunjukkan oleh keadaan yang tidak pernah berhenti pada kedudukan (sosial, spiritual, politik) yang tetap dan konsisten. Ia tidak menolak, membatasi atau melarang apapun, sehingga tidak mempunyai konsep subjek dan ego yang tetap. Ia menerima segala bentuk kontradiksi diri, melakukan segala hal yang bertentangan secara logika, prinsipil, formal dan ideologis. Manusia fatalis menurut Baudrillard adalah mereka yang tidak berdaya dalam kekuasaan objek sehingga hanyut dalam mekanisme dan logikanya. Manusia fatalis dapat dikatakan sebagai orang yang sangat konsumtif, terpengaruh oleh fasion, komoditi, dan gaya hidup.

Di sisi lain, terdapat *homo pluralis*, yang ciri-cirinya mementingkan dialog, dan orang lain sebagai patnernya. Menurut Mikhail Bakhtin *homo pluralis* adalah manusia yang aktif dalam pertukaran sosial dalam rangka keanekaragaman dan pluralitas. Manusia pluralis juga menjunjung multikulturalisme. Multikulturalisme menekankan persamaan, kesetaraan, dan keadilan antara minoritas dan mayoritas. Pemikiran pluralisme ini sejalan dan/atau relevan dengan ideologi *Bhineka Tunggal Ika* yang menjadi karakter bangsa Indonesia.

Berangkat dari pendapat dan pemikiran para ahli tersebut di atas maka perlu kiranya dikembangkan suatu rekayasa budaya melalui pendidikan karakter agar manusia Indonesia kembali mengenali karakter asli atau jati dirinya dan tidak tergerus oleh arus budaya modern/global.

Berdasarkan paparan di depan bahwa karakter bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, dan budaya. Bentuk-bentuk dan praktik budaya Bali yang relevan dengan karakter bangsa Indonesia terrefleksi dalam filosofi *Tri Hita Karana*. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), manusia dengan sesama (*Pawongan*), dan manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). Filosofi *Tri Hita Karana* merupakan landasan dan sekaligus pandangan hidup masyarakat Bali yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sehari-hari orang Bali merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan lagi.

Selain filosofi *Tri Hita Karana*, masyarakat Bali juga menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas yang tercermin dalam konsep *rwa bhineda* dan adagium *desa, kala, dan patra*. Orang Bali mengakui dan menerima perbedaan karena faktor tempat (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan (*patra*). Nilai-nilai pluralitas dalam budaya Bali sangat relevan dengan nilai-nilai multikulturalisme dan moto *Bhineka Tunggal Ika*. Pengakuan terhadap pluralitas dalam budaya Bali tercermin dalam ungkapan: *celebingkah batan biu, belahan pane belahan paso* yang artinya *gumi linggah ajak liu ada kene ada keto*. Makna ungkapan tersebut bahwa sifat dan perangai orang di dunia ini bermacam-macam atau berbeda antara individu yang satu dengan yang lain, dan realita itu adalah suatu yang wajar.

Masyarakat Bali pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Hidup gotong royong dan tolong-menolong adalah nilai yang dijunjung dan dipraktikan oleh orang Bali. Orang Bali mengenal ungkapan *menyama braya* yang bermakna bahwa orang lain itu adalah saudara (*nyama*) dan kerabat (*braya*).

Berdasarkan paparan di depan dapat dikemukakan bahwa bentuk-bentuk tradisi masyarakat Bali yang mencerminkan karakter bangsa antara lain: nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* yang menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya alam. Masyarakat Bali juga mengakui dan menerima adanya pluraritas budaya yang tercermin dalam konsep *rwa bhineda* dan adagium *desa, kala, dan patra*. Perbedaan

senantiasa muncul di dunia yang disebabkan oleh faktor tempat (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan atau kondisi tertentu (*patra*). Selain itu, masyarakat Bali juga menjunjung nilai-nilai kebersamaan atau gotong royong dalam kehidupannya, serta menganggap orang lain sebagai saudara (*nyama*), dan kerabat (*braya*).

g) Aktualisasi Nilai Tradisi

Tradisi *Matiti Suara* yang dipraktikkan oleh masyarakat desa *Pakraman* Batur, Kintamani adalah cerminan sikap dan tanggung jawab dari *prajuru desa* dalam melaksanakan tugasnya, baik secara *sekala* dan *niskala*. *Prajuru desa* atau pejabat di desa *Pakraman* Batur mempertanggungjawabkan segala tindakannya dalam suatu *sangkepan* atau rapat anggota masyarakat secara *sekala/riil*, dan di pihak lain mereka juga mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan (*dewa saksi*) atau *niskala*. Nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab yang terkandung dalam tradisi *Matiti Suara* itu merupakan cerminan sikap hormat atau bakti kepada Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa dan anggota masyarakat secara keseluruhan. Seorang pejabat dituntut harus berani mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat atau sesama secara *sekala*, dan kepada Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa secara *niskala*. Nilai kejujuran yang bersifat *sekala-niskala* yang terkandung dalam tradisi *Matiti Suara* perlu dilestarikan karena mencerminkan karakter bangsa yang berke-Tuhanan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Matiti Suara* tampaknya dilandasi oleh konsep *ngayah* atau persembahan dan pengabdian yang tulus ikhlas tanpa pamerih kepada Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa (*devotion*) dan masyarakat. Para pejabat atau siapapun yang melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus ikhlas tanpa pamerih (*ngayah*) sudah tentu tidak memerlukan imbalan materi. Sikap dan tindakan yang tulus ikhlas tanpa pamerih tidak mendorong orang untuk melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian, tradisi *Matiti Suara* dapat dianggap sebagai pendidikan anti korupsi di masyarakat desa *Pakraman* Batur.

Dalam masyarakat Bali terdapat tujuh aspek yang mengikat dan sekaligus menjadi kewajiban mereka yakni: 1) sembahyang pada pura tertentu, 2) ikatan dan tanggungjawab kepada desa tempat tinggalnya, 3) ikatan kepada organisasi pertanian atau subak, 4) keterkaitan sebagai anggota kasta tertentu, 5) ikatan kekerabatan/*dadia*, 6) keterkaitan sebagai anggota *sekaa* atau organisasi tertentu, dan 7) taat kepada aturan pemerintah yang bersifat formal (Geertz, 1959: 992, Bagus, 1975: 290-291).

Tradisi *Matiti suara* tampaknya terkait dengan kewajiban atau obligasi masyarakat kepada pura, desa *Pakraman* sebagai ikatan tempat tinggal, dan aturan yang berlaku secara formal ataupun informal. *Matiti Suara* adalah cerminan obligasi masyarakat desa *Pakraman* Batur kepada pura atau Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa yang sangat dihormati dan ditakuti oleh orang Bali. Pertanggungjawaban kepada Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa (*dewa saksi*) adalah cerminan sikap dan tanggungjawab yang tulus kepada Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa. Di sisi lain, *Matiti Suara* merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada *desa Pakraman* beserta anggotanya yang merupakan salah satu ikatan dan kewajiban masyarakat Bali.

Berdasarkan uraian di depan bahwa *Matiti Suara* adalah cerminan sikap yang tulus ikhlas tanpa pamerih (*ngayah*) kepada Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa dan masyarakat *desa Pakraman*. Nilai-nilai kejujuran dan bekerja secara tulus ikhlas tanpa pamerih dari tradisi *Matiti Suara* dapat dipandang sebagai sikap dan tindakan anti korupsi masyarakat desa *Pakraman* Batur yang perlu dilestarikan.

h) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebertahanan Tradisi

Dalam upaya memahami dan mengembangkan karakter dan/atau jati diri bangsa maka pendidikan nasional memegang peranan penting. Pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi sebagai pembudayaan (*enkulturasi*) bagi peserta didik. Pembudayaan adalah pembentukan karakter dan watak (*nation and character building*) yang pada gilirannya sangat krusial menuju rekonstruksi negara dan bangsa yang lebih maju dan beradab (Nurokhim, diunduh 12/16/2010).

Kementerian Pendidikan Nasional RI telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan karakter dirumuskan dalam empat pilar yang dikeluarkan oleh UNESCO meliputi *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Peserta didik diharapkan dapat memahami, mengerjakan, menjadi, dan hidup dalam kebersamaan. UNESCO tampaknya menekankan pentingnya sosok manusia yang dapat hidup bersama dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan karakter mencakup empat aspek yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga. Pendidikan olah pikir menekankan agar peserta didik memiliki visi (*visioner*), cerdas, kreatif, dan terbuka. Tujuan pendidikan yang berorientasi pada olah hati terkait dengan sifat-sifat yang jujur, ikhlas, religius, dan adil. Pendidikan olah rasa/karsa bertujuan agar peserta didik memiliki sifat-sifat yang peduli terhadap berbagai kondisi sosial budaya di sekitarnya, demokrasi, gotong royong, dan suka membantu. Pendidikan olah raga bertujuan agar peserta didik memiliki sifat yang gigih, kerja keras, disiplin, bersih, dan bertanggung jawab. Empat pilar tersebut merupakan landasan pembentukan karakter manusia Indonesia.

Menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan meliputi tiga komponen yang tidak terpisahkan yakni budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Ketiga komponen tersebut agar diberikan secara proporsional dan seimbang sesuai dengan perkembangan si anak didik. Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Program ini merupakan tanggungjawab bersama dan harus melibatkan keempat unsur dalam pendidikan yakni pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua atau keluarga. Dalam upaya pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa diperlukan adanya gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan di lapangan.

Seperti telah dipaparkan di depan bahwa tradisi *Matiti Suara* sangat relevan dengan karakter bangsa yakni sikap yang berke-Tuhanan, jujur dan tulus. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Matiti Suara* harus dipertahankan melalui pendidikan formal, informal maupun non formal.

Rumah tangga atau keluarga merupakan komponen penting dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Keluarga sebagai lingkungan pembentuk pendidikan karakter pertama dan utama sehingga harus diberdayakan. Menurut Philips (dalam Nurokhim, 2010) keluarga hendaknya menjadi *school of love*, sekolah kasih sayang dan cinta sejati. Dalam keluarga/rumah tangga anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya dan mereka mendapat contoh langsung dari orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang nilai-nilai, etika, dan estetika yang dianggap sesuai dengan karakter bangsa.

Dalam lembaga keluarga identitas ke-Bali-an seperti *Matiti Suara* pertama dikenalkan dan dibentuk kepada anak-anak. Melalui lembaga keluarga pula tradisi *Matiti Suara* dipertahankan. Hal ini sesuai dengan fungsi keluarga sebagai tempat menuai berbagai nilai-nilai budaya sehingga berkembang menjadi kebudayaan yang mencirikan identitasnya (Margi, 2012: 289). Orang tua atau orang yang dituakan menjadi model dan menduduki peran yang dalam mempertahankan tradisi *Matiti Suara* atau nilai-nilai budaya Bali. Hal ini sesuai dengan pendapat Benyamin Spock dalam Margi(2012: 290) bahwa setiap individu akan mencari figur yang dapat dijadikan teladan atau idola bagi mereka. Orang tua yakni ayah dan ibu pada umumnya menjadi teladan bagi anak-anak mereka yang sejenis, dan idola bagi anak-anak yang berlainan jenis. Dengan kata lain bahwa seorang ayah adalah idola bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Tradisi *Matiti Suara* di desa *Pakraman* Batur dapat disosialisasikan kepada anak-anak ataupun remaja sebagai pewaris dan generasi penerus melalui berbagai saluran atau media seperti rapat keluarga/*dadia*, arisan keluarga, sembahyang bersama, dan kegiatan upacara siklus hidup. Nasehat atau petuah tentang nilai dan makna *Matiti Suara* kepada generasi muda harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang mapan dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Mengacu kepada pemikiran Barthes bahwa segala yang tetap, mapan dan stabil merupakan mitos (Margi, 2012: 293). Selanjutnya, mitos tersebut dimapankan secara terus-menerus sehingga akhirnya berkembang menjadi ideologi.

Pendidikan karakter melalui sekolah dapat dilakukan dengan penanaman moral, nilai-nilai, etika, estetika, budi pekerti yang luhur dan sebagainya. Pendidikan melalui sekolah tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan. Pemberian penghargaan kepada yang berprestasi (*prizing*), dan hukuman kepada yang melanggar, menumbuhkan nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discouraging*) nilai-nilai yang buruk adalah sebagian kecil contoh pendidikan karakter di sekolah.

Dalam kaitannya dengan tradisi *Matiti Suara*, sekolah mungkin dapat memperkenalkan tradisi tersebut sebagai sebuah kearifan lokal. Tradisi *Matiti Suara* dapat diselipkan dalam berbagai mata pelajaran seperti budi pekerti, agama, sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan sekolah atau pendidikan formal dapat digunakan untuk pemertahanan tradisi *Matiti Suara*.

Lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap karakter dan watak seseorang. Masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai, etika, estetika dan pembentukan karakter. Sehubungan dengan itu, pemertahanan tradisi *Matiti Suara* dapat diperkenalkan kepada anak-anak dan remaja melalui pendidikan *pasraman*, dan *sekaa* truna-truni di desa *Pakraman*. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) setempat perlu kiranya turun tangan untuk mempertahankan dan menyosialisasikan nilai-nilai dan makna tradisi *Matiti Suara* kepada masyarakat. Tradisi *Matiti Suara* juga dapat dipertahankan melalui *sekaa* atau lembaga tradisional seperti *sekaa shanty*, *sekaa gamelan* dan kesenian, serta anggota *subak*.

Pemertahanan tradisi *Matiti Suara* dapat dilakukan melalui keluarga, masyarakat/ lingkungan, pendidikan sekolah, dan lembaga tradisional ataupun *sekaa*. Keluarga atau orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam memperkenalkan dan menanamkan nilai dan makna tradisi *Matiti Suara*. Orang tua dapat menjadi panutan bagi anak-anak dan remaja dalam mempertahankan tradisi *Matiti Suara*.

Masyarakat desa *Pakraman* Batur juga memiliki peran yang strategis untuk pemertahanan tradisi *Matiti Suara*. Para *prajuru* desa *Pakraman* harus senantiasa mensosialisasikan tradisi tersebut konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan maupun pertemuan. Nilai-nilai *Matiti Suara* agar betul-betul dipahami dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan oleh seluruh anggota masyarakat baik tua maupun muda.

Sekolah ataupun pendidikan formal dapat digunakan untuk pemertahanan nilai-nilai dan makna tradisi *Matiti Suara*. Tradisi tersebut dapat diselipkan sebagai muatan lokal dalam berbagai mata ajar seperti budi pekerti, agama, sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Pemahaman dan penanaman nilai dan makna tradisi *Matiti Suara* sejak dini akan sangat penting dalam pendidikan karakter.

Berbagai lembaga formal maupun informal seperti PHDI dan *sekaa-sekaa* yang ada di desa Pakraman Batur diharapkan dapat menyosialisasikan dan mempraktikkan nilai-nilai dan makna tradisi *Matiti Suara*. Melalui lembaga tersebut tradisi *Matiti Suara* akan dapat *ajeg* dan lestari.

Globalisasi yang bersifat paradoks merupakan tantangan dan sekaligus peluang dalam memahami dan mempertahankan karakter bangsa Indonesia. Penyeragaman atau homogenitas budaya, individualisme, dan materialisme merupakan kekuatan global yang dapat melemahkan karakter bangsa Indonesia. Dalam konteks ini akan muncul homo minimalis dengan sifat-sifat antara lain: inkonsisten atau tidak tetap pendirian, tidak visioner, materialistis, dan konsumtif. Di sisi lain, globalisasi justru akan mendorong penguatan budaya lokal yang bersifat plural. Manusia pluralis dengan ciri-ciri menghargai manusia lain sebagai partner dialog, aktif dalam pertukaran sosial, dan menjunjung tinggi prinsip multikulturalisme atas landasan persamaan, kesetaraan, dan keadilan.

Tradisi Matiti Suara sebagai sebuah kearifan lokal akan dapat dipertahankan di era global ini karena menjadi identitas masyarakat desa Pakraman Batur. Pemahaman dan pemertahanan nilai-nilai dan makna *tradisi Matiti Suara* dapat dijadikan sebagai *counter trends* untuk menunjukkan keunikan budaya lokal di era global sekarang ini.

Pemertahanan karakter bangsa termasuk tradisi *Matiti Suara* dapat dilakukan dengan pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter mencakup olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan oleh raga. Pengembangan pendidikan karakter lebih ditekankan pada praktik yang dilakukan di lingkungan rumah tangga atau keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Pendidikan karakter bangsa tampaknya sejalan dan relevan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer posstrukturalisme dan postmodern yang lebih menonjolkan pluralism dan multikulturalisme berazaskan keragaman, saling menghormati, persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Gerakan atau upaya penyeragaman dapat dikatakan bertentangan dengan karakter bangsa yang bersifat plural sehingga perlu diantisipasi keberadaannya.

B. Tradisi *Matiti Suara* Masyarakat Desa Pakraman Batur Kintamani

Umat Hindu dalam melaksanakan upacara keagamaan bertujuan untuk mengungkapkan rasa *Bhakti* dan rasa terimakasih dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, karena berkat Beliau lah manusia dapat hidup dan berkembang dengan baik di dunia ini. Tuhan menciptakan dunia ini berdasarkan "*Maha Yadnya*" (korban besar), sehingga sudah sepatutnyalah manusia itu memberikan persembahan pula pada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukanlah sarana dalam suatu upacara keagamaan yang secara umum disebut *upakara* dalam bentuk sesajian atau *banten* yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan serta aturan-aturanyang berlaku.

Pelaksanaan upacara *yadnya*, *upakara* sangat berperan penting karena upakara merupakan sarana persembahan yang disertai dengan puja atau doa umat dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Selain itu *upakara* juga sebagai alat pengungkap maksud dan perasaan manusia yang abstrak atau dengan kata lain segala sesuatu yang terkandung dalam pikiran manusia yang abstrak dapat diwujudkan atau dilukiskan dengan berbagai macam jenis *upakara* yang di dalam persembahan itu mengandung maksud secara simbolik.

Dihayati secara mendalam, mengenai diciptakannya manusia dengan *yadnya* mengingatkan peranan dan kedudukan manusia dalam kehidupannya bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya sesama ciptaan-Nya, maka manusia dinilai mempunyai peranan mampu sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam memaknai *yadnya*. Mencapai tujuan agama Hindu yaitu "*Mokhsartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*", singkatnya, mencapai kesejahteraan lahir dan batin melalui jalan *dharm*a. Ada anggapan yang mengatakan bahwa upacara tanpa *upakara* adalah kosong dan *upakara* tanpa upacara adalah bohong, hal ini nampaknya sangat tepat bila dilihat dari kenyataan sistem atau praktek keagamaan yang ada di Bali pada khususnya. Lebih jauh dari pernyataan itu adalah apabila melaksanakan suatu upacara tanpa *upakara*, maka yang dilaksanakan itu sama dengan membohongi diri sendiri demikian pula sebaliknya. Demikian pula ada *upakara* yang lengkap tanpa ada pelaksanaan upacara yang sesuai dengan ajaran agama dan puja, maka semuanya itu tidak akan mempunyai arti. *Upakara* dapat diibaratkan sebagai perahu untuk dapat menyebrangi lautan yang luas. Orang tidak akan mampu menyebrangi lautan yang luas tanpa menggunakan alat. Dalam melaksanakan suatu *yadnya* atau upacara tidak ada yang mengharuskan seseorang bermewah-mewahan karena hal yang paling mendasar dalam suatu pelaksanaan upacara adalah ketulusan dan rasa *Bhakti* terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Di samping itu dalam agama Hindu memiliki ajaran mengenai tingkatan tata cara pelaksanaan upacara yakni *nista*, *madya* dan *utama*. Keberadaan tingkatan pelaksanaan *yadnya*, menyebabkan seorang *yajamana* dapat melaksanakan *yadnya* sesuai dengan kemampuan, menurut situasi dan kondisi asalkan persembahan itu didasari atas sikap ketulusan hati.

Dalam *Bhagawadgita* dijelaskan bahwa persembahan yang sederhana pun akan diterima oleh-Nya. Hal ini membuktikan bahwa dalam suatu pelaksanaan upacara, tidak dituntut sarana yang mewah atau besar, hal itu tergantung kemampuan seorang (umat). Yang terpenting adalah ketulusikhlasan dan pengungkapan rasa bhakti yang sungguh-sungguh.

*Patram puspam phalam toyam
Yo me bhaktya prayacchati
Tad aham bhaktya pahritam
Asnami prayatatmanah*

(*Bhagawadgita*, IX. 26)

Terjemahan:

Barang siapa yang bersujud bhakti kepada-Ku

Dengan persembahan sehelai daun, sekuntum bunga

Sebutir buah dan seteguk air, Aku terima sebagai bhakti persembahan dari orang yang berhati suci (Pudja, 1984 : 220).

Selanjutnya dalam *Kekawin Nitisastra* dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan suatu upacara dengan menggunakan sarana atau sesaji dapat mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Adapun kutipannya sebagai berikut:

*Sang weddajna phalanya homa wangnan bhyaktam roteng rat kabeh,
Silawertti phalanya ring srutti pageh rin bhudi tan cancala,
Bhoganindys phalanya yan kinahan ring artha daneng praja,
Ring astir putra phalanya ring surata len cardula witri dita.*

(*Nitisastra*, I. 14)

Terjemahan:

Orang yang paham akan *Weda*, perlu mengadakan sesaji atau korban agar mendatangkan keselamatan bagi segala orang watak yang tetap dan hati yang teguh tidak terguncang-guncang adalah kesenangan hidup yang suci dan sedekah bagi orang lain, buat orang perempuan anak laki-lakilah menjadi kesenangan percintaan (Tim, 1983-1984: 15).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan mengenai pengertian *upakara*. *Upakara* berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yakni "upa" dan "cara". "upa" berarti hubungan dengan dan "kara" berarti tangan. Dilihat dari etimologinya, *upakara* berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tangan. Adapun maksudnya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh tangan atau hasil perbuatan tangan yang berhubungan dengan upacara. Pada umumnya yang dimaksud dengan *upakara* adalah berupa material, dalam agama Hindu disebut dengan *banten* atau *sesajen*. Jadi, *upakara* adalah suatu bentuk materi yang dipakai sebagai sarana atau simbol dari cetusan hati nurani manusia yang abstrak dalam melaksanakan upacara.

a) Tradisi dan Filosofi *Matiti Suara* dalam Pelaksanaan Upacara *Bakti Papranian Ngusaba Kadasa* Masyarakat Desa *Pakraman Batur Kintamani*

Tradisi *Matiti Suara* dalam *bhakti papranian* serangkaian upacara *Ngusaba Kadasa* di desa *Pakraman Batur* sampai saat ini tidak diketahui secara jelas. Latar belakang pelaksanaannya dari segi historis, sampai saat ini belum ditemukan sumber-sumber tertulis mengenai sejarah ataupun catatan peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang pelaksanaan tradisi ini. Hal ini dikarenakan pada saat Gunung Batur meletus, bukti-bukti sejarah hilang tertimbun material dari Gunung Batur. Namun secara filosofis, pelaksanaan tradisi *Matiti Suara* dalam *bhakti papranian* serangkaian upacara *Ngusaba Kadasa* di Pura Ulun Danu Batur merupakan suatu cara atau jalan keadaban luhur untuk mewujudkan kesejahteraan dunia beserta isinya. Wujud riil perilaku masyarakat Batur, dengan kesadaran yang tinggi melaksanakan amal perkerjaan secara tulus dan ikhlas.

Jro Gede Batur Makalihan (*Duwuran* dan *Alitan*), dalam laporan sebagai *manggalaning* (pemimpin) upacara, mengungkapkan tujuan diadakannya tradisi *Matiti Suara* adalah untuk menjadikan *jagat trepti* (aman, tenang, damai, dan tenteram). Suasana *trepti* ini tercermin dari makna hakiki wacana *Matiti Suara*, yaitu *sabdha saking Ida Bhatari sane malinggih ring Pura Ulun Danu Batur sane patut anggen dasar swadharmaning dharma agama kalihdharma negara sane patut kamarginin olih krama Desa Batur kalih umat Hindu sareng sami* (Sabda dari Ida Bhatari yang berstana di Pura Ulun Danu Batur yang patut dijadikan dasar keyakinan saat melakukan kewajiban agama dan negara bagi warga masyarakat desa *Pakraman Batur* dan umat Hindu semuanya). Dalam *sabdha* Ida Bhatari terkandung ajuran sakral agar umat sedharma selalu ingat lahir ke dunia selalu dan senantiasa berbuat atas landasan *dharma*, terlebih lagi agar berjanji kepada diri sendiri hanya akan memakai kemampuan yang ada di dalam diri untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Lebih lanjut pemahaman tradisi *Matiti Suara* dapat diselami dalam wacana kebahasaan. Kata jadian *Matiti Suara* berasal dari bentuk frasa dasar *titi suara* yang artinya pralambang sabda suci jembatan emas untuk mematuhi perintah gaib dari *Ida Bhatara Bhatari* yang *malinggih* di Pura Ulun Danu Batur yang disampaikan kepada *krama* Desa Batur khususnya dan umat Hindu *sedharma* pada umumnya agar dalam menjalani kehidupan senantiasa berbuat sesuatu yang berlandaskan *dharma*.

Berdasarkan atas *sabda* yang diberikan oleh *sesuhunan* di Pura Ulun Danu Batur kepada *krama* Desa Batur, dimana *krama* Desa Batur serta seluruh umat Hindu dituntut untuk mampu

menjalankan *dharma* dalam setiap perbuatan yang dilakukan serta kerja keras dari diri sendiri, karena segala sesuatu usaha dan kerja keras yang berlandaskan *dharma* akan memperoleh hasil yang baik. Landasan filosofi hakikat perilaku *dharma* masyarakat Batur ini dapat dirujuk dalam kitab *Sarasamuccaya*, yang menyatakan sebagai berikut.

*Kamarthau lipsamanastu
Dharmmamevaditascaret
Nahi dharmmadapetyarthah
Kamo vapi kadacana*

(*Sarascamuccaya*, 12)

Artinya :

Pada hakekatnya, jika *artha* dan *kamadituntut*, maka seharusnya *dharma* hendaknya dilakukan lebih dulu. Tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh *artha* dan *kama* itu nanti. Tidak akan ada artinya, jika *artha* dan *kama* itu diperoleh menyimpang dari *dharma*.

Kutipan *sloka* di atas, menegaskan bahwa jika dalam setiap perbuatan itu berlandaskan akan *dharma*, maka akan menghasilkan suatu pahala yang berarti, namun jika perbuatan yang dilakukan untuk mencapai *artha* dan *kama* menyimpang dari ajaran *dharma*, maka semua usaha tersebut tak akan berarti atau menjadi sia-sia. Apapun yang di tanam atau dipersembahkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, atas kemurah hatian Beliau, maka hasil yang di dapat akan jauh lebih banyak dari apa yang diharapkan, terlebih lagi jika didasari atas sikap ketulusan hati yang paling hakiki, yaitu *dharma* menjadi landasan dalam setiap perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari apabila sebagai manusia mau menjalankan sesuatu yang menjadi kewajiban di dunia dengan bekerja keras dan selalu usaha yang dilakukan senantiasa berlandaskan *dharma*. Walaupun itu pekerjaan yang kecil sekalipun, maka hasil dari kerja keras itu akan didapatkan, karena tidak ada hasil tanpa adanya perbuatan dan tidak ada orang yang memiliki segalanya tanpa bekerja keras dan *dharma* adalah suatu kekayaan yang tidak akan dapat dirampas. Dalam kitab *Sarasamuccaya*, dinyatakan sebagai berikut:

*Dharmaccennavasideta kapalenapi
Jivatah adhyo' smityavagantavyam
Dharma vitta hi sadhavah*

(*Sarasamuscaya*, 50)

Artinya :

Biarpun orang sangat miskin dan hidup dari hasil meminta-minta, jika tetap yakin dan kuat melakukan *dharma*, anggaplah diri anda kaya saja, sebab laksana *dharma* itulah merupakan harga kekayaan orang saleh, itulah patut dicari, itulah yang ku katakan harta kekayaan yang tidak dapat dicuri, dirampas dan sebagainya.

Kutipan *sloka* pustaka suci *Sarasamuscaya* di atas menegaskan bahwa segala perbuatan jika yakin dan kuat melaksanakannya dengan berlandaskan *dharma*, maka hasil yang diperoleh tidak saja yang berwujud benda tetapi lebih daripada itu, yang bersifat *niskala* (tidak tampak) pun didapatkan. Amal saleh yang didasari *dharma* ini dijamin oleh *dharma* sendiri. Kalau ia seumpama harta kekayaan, ia pasti tidak akan berpindah dan apalagi dapat dicuri oleh orang lain. Ia tetap menjadi milik mereka yang melaksanakan *dharma* itu sendiri.

Tradisi *Matiti Suara* adalah bangun tradisi yang berlangsung secara turun temurun, yang merupakan bagian dalam *bhakti papranian*, serangkaian upacara *Ngusaba Kadasa* di Pura Ulun Danu Batur. Pelaksanaan tradisi *Matiti Suara* ini dilaksanakan oleh seorang *Jro Guru* atau *Keraman*, bertugas menyampaikan *sabda* dari *sesuhunan* yang berstana di Pura Ulun Danu Batur. Isinya, *sabda* untuk mengingatkan manusia (umat Hindu sedharma) manakala hidup di dunia harus senantiasa berbuat *dharma* dan berjanji kepada diri sendiri hanya akan memakai kemampuan yang ada didalam diri untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Melalui tradisi *Matiti Suara* ini pula, masyarakat Desa Batur dapat meningkatkan kualitas *sraddha Bhakti* (keyakinan dan kepercayaan) kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Ungkapan *sraddha Bhakti* yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan *yadnya* ini semakin memperkuat keyakinan dan kepercayaan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Bekerja jujur yang dilandasi rasa pengabdian dan dedikasi kerja yang tulus dan ikhlas. Sedikit atau secuilpun tidak ada keinginan untuk mencari untung atau menilap harta yang bukan menjadi haknya, dan apalagi niat dan melakukan perbuatan korup. Inilah dasar pelaksanaan tradisi *Matiti Suara* sehingga menjadi sebuah tradisi yang tetap eksis hingga sekarang.

Tradisi *Matiti Suara* adalah bagian dari upacara *bhakti papranian* yang merupakan rangkaian terakhir dari upacara *Ngusaba Kadasa* di Pura Ulun Danu Batur. Tradisi ini dilaksanakan atau diadakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada saat akhir dari upacara *Ngusaba Kadasa* yang biasanya *nyejer* selama sembilan sampai sebelas hari atau lebih tepatnya harus ganjil dan tidak boleh jatuh pada *hari pasah*. Pada tahun 2012, Upacara *Ngusaba Kadasa* jatuh pada *Purnama Sasih Kadasa* pada hari *sukra kliwon wuku medangkungan* dan *nyejer* selama 15 hari. Tradisi *Matiti Suara* ini dilaksanakan pada hari *Wrspati pon wuku uye* pukul 16.00 wita.

b) Tempat, Pelaksana, dan Sarana Prasarana Tradisi *Matiti Suara*

Tradisi *Matiti Suara* dilaksanakan di areal Pura Ulun Danu Batur, di *Jaba Tengah* Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. *Upakara* atau banten upacara yang dipersembahkan adalah *bantenprani*, dihaturkan disetiap *pelinggih* Pura Ulun Danu Batur. Tradisi *Matiti Suara* merupakan bagian dari upacara *Bhakti Papranian*, rangkaian penutup dari upacara *Ngusaba Kadasa* di Pura Ulun Danu Batur. *Banten Prani* wujud persembahan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai ungkapan rasa syukur dan ungkapan rasa terima kasih atas suksesnya acara *Ngusaba Kadasa* di Pura Ulun Danu Batur. Tradisi *Matiti Suara* dapat segera dilaksanakan setelah segala sesuatunya siap, seperti waktu yang telah ditentukan, tempat penyelenggaraan, dan jenis-jenis upakara yang dihaturkan pada setiap *pelinggih*, terutama tempat-tempat tertentu seperti *Kori Agung* di *Jaba Tengah*. Tradisi *Matiti Suara* dijalankan oleh seorang *Jero Guru Bedanginan* dari Desa Batur.

Agar pelaksanaan *Matiti Suara* menjadi jelas, berikut ini disampaikan pihak-pihak yang terlibat antara lain : 1) *Jero Gede* sebagai *manggalaning* upacara, Beliau juga bisa dikatakan sebagai penanggung jawab dari setiap pelaksanaan upacara yang ada di Pura Ulun Danu Batur, 2) *Jero Balian* sebagai *pemuput* setiap upacara yang dilaksanakan di Pura Ulun Danu Batur, 3) Seorang petinggi atau *perbekel* dari salah satu desa dinas yang masuk dalam wilayah Desa Batur yang mana petinggi ini akan melaporkan masalah *pengerauhan* (pendapatan) dan *penelasan* (penghabisan) selama *Ngusaba Kadasa* berlangsung, 4) *Jero Guru Bedanginan* sebagai pelaku atau pelaksana dari tradisi *Matiti Suara* dimana Beliau sebagai pengantar dari *sabda* yang telah diberikan oleh *sesuhunan* yang berstana di Pura Ulun Danu Batur, 5) *Jero Baris* adalah penari yang menarik tarian perang-perangan yang dipentaskan sebelum tradisi *Matiti Suara* tersebut

dimulai, 6) *Batun Sendi Ida Bhatara* adalah desa-desa yang terletak di luar Desa Batur dan masih di sekitar wilayah Pura Ulun Danu Batur seperti : *desa Bonyoh, Bayung Gede, Sri Batu, Buahon, Selulung*. Keterikatan desa-desa yang masuk ke dalam kelompok “*Batun sendi Ida Bhatara*” dengan Pura Ulun Danu Batur karena desa-desa yang masuk ke dalam kelompok *batun sendi Ida Bhatara* terikat dengan *ayah-ayahan* (kewajiban yang tidak boleh dilalaikan) dengan Pura Ulun Danu Batur.

Keterikatan dalam bentuk *ayah-ayahan* dari desa-desa yang disebutkan di atas ini telah berlangsung sejak dahulu dan sudah merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh desa yang masuk dalam kelompok “*Batun sendi Ida Bhatara*”, biasanya pada saat sebelum puncak acara *Ngusaba Kedasa* di Pura Ulun Danu Batur ini dilaksanakan, masyarakat desa yang tergabung dalam “*Batun sendi Ida Bhatara*” melakukan kegiatan *ngayah* di pura mengabdikan diri baik tenaga maupun materi yang dibutuhkan oleh pihak pura untuk mendukung terlaksananya *Ngusaba Kedasa* ini seperti mempersembahkan *palawija, palagantung* dan *rerampen* (janur, ron, daun pisang, *base* dan daun-daun pelengkap upakara) dan di akhir rangkaian *Ngusaba Kedasa*, desa-desa yang masuk ke dalam “*Batun sendi Ida Bhatara*” diberi penghormatan dalam upacara *Bhakti Papranian* diundang untuk makan bersama-sama dengan *prajuru* Desa Batur dan krama Desa Batur, 7) Para Pemimpin *Sajebag* Bali seperti: Gubernur (sebagai pemimpin di Bali), seluruh bupati se-Bali, *seluruh pengelingsir* puri se-Bali yang diberi kehormatan atau diundang untuk datang dan ikut menyaksikan rangkaian penutup dari upacara *Ngusaba Kedasa* di Pura Ulun Danu Batur, sekaligus diberi kehormatan untuk ikut melakukan *bhakti papranian* yaitu makan bersama di Pura Ulun Danu Batur, 8) Krama Desa Batur sebagai *pengempon* dari pura Ulun Danu Batur dimana pada saat tradisi *Matiti Suara* ini berlangsung mendengarkan secara seksama *sabda* yang diberikan oleh *sesuhunannya*, dan ikut bersorak gempita pertanda *sabda* yang telah diberikan akan diamalkan dalam kehidupannya.

Sarana dan prasarana atau upakara yang dipergunakan untuk keperluan upacara tradisi *Matiti Suara* sebagaimana halnya sarana upacara di Bali menggunakan dan mengolah isi alam (*bhuana agung*), yang mana segala jenisnya diambil dari isi alam yang kemudian diolah menjadi suatu bentuk yang pantas untuk dipersembahkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Upakara atau *banten* yang dipergunakan pada saat upacara *Meprani* yang di dalam upacara tersebut terdapat suatu tradisi yaitu tradisi *Matiti Suara* antara lain.

(a) **Banten Prani**

Banten prani adalah *banten* pokok dalam upacara *maprani*. Ini dikarenakan setiap keluarga membawa satu buah *banten prani* ke Pura Ulun Danu Batur sebagai syarat keikutsertaan dalam upacara *Maprani*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *prani* artinya *haturan* atau sarana atau persembahan. Jadi, *banten prani* adalah wujud persembahan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang mana nantinya setelah dihaturkan atau dipersembahkan, *lungsurannya* akan dimakan bersama-sama keluarga.

Banten prani terdiri dari: (1) nasi, (2) lauk, (3) sayur, (4) kacang saur, (5) air, (6) aneka buah-buahan, dan (7) aneka jajan (*jaje gina, jaje uli, jaje basah*). Semua komponen di atas ditanding di atas *dulang* yang sebelumnya dialasi sebuah *taledan* berbentuk bundar yang disebut *idur* (karena *diidur* atau *diplekir*) yang disesuaikan dengan *dulang*. Di bagian atas terdapat *sampiyon* yang terdiri dari sebuah *senteg* dan sebuah *canang cau* (jumlah *canang cau* disesuaikan dengan kebutuhan). Di bagian atas *banten prani* (di atas *sampiyon*) terdapat *urab* dan *tape* yang dibagikan oleh pihak pura Ulun Danu Batur. Di samping *banten prani* di atas, wajib pula menghaturkan *banten prani* di setiap *pelinggih*. *Banten prani* yang lain juga terdiri dari : 1) nasi, 2) lauk, 3) sayur, 4) kacang saur, 5) air, 6) aneka buah-buahan dan 7) aneka jajan (*jaje gina, jaje ulijaje basah*). Semua komponen

di atas ditanding di atas *dulang* yang sebelumnya dialasi sebuah *taledan* berbentuk bundar yang disebut *idur* (karena *diidur* atau *diplekir*) yang disesuaikan dengan *dulang*. Di bagian atas terdapat *sampiyang* yang terdiri dari sebuah *senteg* dan sebuah *canang cau* (jumlah *canang cau* disesuaikan dengan kebutuhan). Di bagian atas *banten prani* (di atas *sampiyang*) terdapat *urab* dan *tape* yang dibagikan oleh pihak pura Ulun Danu Batur.

Dalam tradisi *Matiti Suara* mempergunakan beberapa jenis *banten upakara* atau *banten* yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. 1) Banten pertama *pejati* berasal bahasa Bali, dari kata “*jati*” mendapat awalan “*pa-*”. *Jati* berarti sungguh-sungguh, benar-benar. Awalan *pa-* membentuk kata sifat, *jati* menjadi kata benda *pajati*, yang menegaskan makna melaksanakan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh. Jadi, *banten pejati* adalah sekelompok *banten* yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan manifestasi-Nya, akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan, dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. *Banten pejati* merupakan *banten* pokok yang senantiasa dipergunakan dalam upacara *panca yadnya*.

Banten Pejati sering juga disebut “*Banten Peras Daksina*”, Ketika pertama kali masuk dan sembahyang di sebuah tempat suci, begitu pula jika seseorang memohon jasa *Pemangku* atau *Pedanda*, “*meluaskan*” kepada seorang *balian* atau *seliran*, *banten pejati* sering dibuat untuk melengkapi sebuah *upakara*. Oleh karena itu, *pejati* dipandang sebagai *banten* yang utama. Di setiap rangkaian *banten* apa saja, selalu ada *pejati* dan *pejati* dapat dihaturkan di mana saja serta untuk keperluan apa saja.

Komponen *Pejati* terdiri dari sebuah *daksina*, *pangkonan* atau *penek putih* dua buah, *tipat kelanan satu kelan* (enam biji) adalah lambang dari *Sad Ripu* yang telah dapat dikendalikan atau teruntai oleh rohani sehingga kebajikan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Dengan terkendalinya *Sad Ripu* maka keseimbangan hidup akan menyelimuti manusia, *tipat dampulan* dua buah, *kacang saur* dan telur matang satu buah, buah dan jajan secukupnya, *sampiyang ajuman* tiga buah, *marekan (canang sari)* tiga buah dan *kepetan* satu buah. *Daksina* pada gambar diatas terdiri dari: 1) sebuah kulit *daksina* atau *cerobong daksina* yang terbuat dari *slepan* (janur yang sudah tua), 2) daun pisang secukupnya yang akan diletakan di dalam kulit *daksina*, 3) beras secukupnya, 4) *tapak dara* yaitu *busung* yang di rangkai menjadi bentuk seperti tanda tambah, 5) kelapa satu butir biasanya yang suda tua, 6) *kojong* yang terbuat dari *busting* sebanyak 7 buah yang masing-masing berisi: telur bebek, pisang mas, *werti* satu pasang, *kekaputan* (terbuat dari kulit jagung), *pis bolong* sebanyak 11 buah, *base (ampin* yang telah diisi bunga di atasnya dan *cenigan* yang terbuat dari beberapa daun yang dijadikan satu yaitu: daun manggis, daun salak, daun tiblun dan daun cemara. Di rangkai menjadi satu kesatuan yaitu *daksina*. Di atas *daksina* terdapat sebuah pebersihan (*pesucian*).

Perlengkapan seperti telur itik, uang ataupun kekaputan kiranya dapat digolongkan buah sebab pengertian buah mempunyai arti yang agak luas. Persembahan yang berupa *daksina* dianggap sudah lengkap. Di samping itu penggunaan telur itik dan uang rupanya mempunyai fungsi tersendiri secara umum serta kelapa dapat digolongkan sebagai buah.

Diusahakan mempergunakan telur itik bukan telur ayam sebab itik lebih banyak menunjukkan sifat-sifat *satwam* sedangkan ayam lebih banyak menunjukkan sifat rajas dan tamas. Oleh karena itu pula beberapa *daksina* terutama yang melambangkan *bhutakala* dipergunakan telur ayam, tetapi bila ditujukan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* para *Dewa* dan leluhur sedapat mungkin dipergunakan telur itik. Penggunaan uang yang disebut pula *sesari* atau *akah* kiranya untuk menyempurnakan isi *daksina* sehingga persembahan yang dilengkapi dengan *daksina* benar-benar diharapkan memberikan kesuksesan atau hasil yang sebagaimana diharapkan.

(b) Banten Daksina disebut juga “Yadnya Patni”

Yadnya Patni yang artinya istri atau sakti dari pada *yadnya*. *Daksina* juga dipergunakan sebagaimana persembahan atau tanda terima kasih, selalu menyertai *banten-banten* yang agak besar dan sebagai perwujudan atau *petapakan*. Dalam lontar *Yadnya Prakerti* disebutkan bahwa *daksinamelambangkan Hyang Guru* atau *Hyang Tunggal*, kedua nama tersebut adalah nama lain dari *Dewa Siwa*. Ada beberapa *daksina* yang sering dipergunakan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya *daksina cenik* atau alit isinya tiap jenis satu biji atau butir. *Daksina pekala-kalaan* isinya dilipatkan dua kali, *daksina gede* isinya dilipatkan empat kali, *daksina krepa* isinya dilipatkan tiga kali. *Daksina galahang*, isinya dilipatkan lima atau sepuluh kali.

Setelah semua komponen siap, barulah dirangkai, ditanding di atas *dulang* yang sebelumnya dialasi sebuah *taledan* berbentuk bundar yang disebut *idur* (karena *diidur* atau *diplekir*) yang disesuaikan dengan *dulang*. *Banten pejati* ini dihaturkan ke *luhur*, untuk meminta *upasaksi* dihadapan *Ida Bhatari Luhuring Akasa* dan *Sang Hyang Surya* memohon agar nantinya prosesi *Matiti Suara* ini lancar dan tanpa halangan yang berarti.

(c) Banten Tapakan Mesoroh.

Banten ini terdiri dari: *tapakan dan sorohan*. *tapakan* terdiri dari: 1) satu buah *tamas* sebagai alas yang terbuat dari *slepan* (janur yang sudah tua), 2) satu buah kelapa yang sudah tua, 3) beras secukupnya, 4) *kojong* empat buah yang isinya *kekaputan* tiga buah, *base tampin* yang sudah diisi bunga, telur bebek, *pisbolong* 225 buah dan benang *tukelan* yang diletakkan di atas kelapa.

Sorohan terdiri dari: 1) *tumpengputih* satu pasang yang dirangkai dengan *kacang saur* dan satu ekor ayam utuh yang digoreng, sampiannya yaitu *sampiyon tumpeng* satu buah, *plans* satu buah dan *canang* satu buah, 2) *pangkonan putih* satu pasang yang dirangkai dengan *kacang saur* dan telur dadar, sampiannya yaitu *ajuman* dan *canang* secukupnya dan 3) *tempani* yang isinya adalah *jajegina* putih satu *kebesan*, *jaje gina* merah tiga *kebesan*, satu buah pisang dan diletakkan satu buah *plans* di atasnya.

Setelah itu *tapakan* dan *sorohan* ditanding di atas *dulang* yang sebelumnya dialasi sebuah *taledan* berbentuk bundar yang disebut *idur* (karena *diidur* atau *diplekir*) yang disesuaikan dengan *dulang* di atasnya diletakkan sebuah *kepetan*. *Banten tapakan mesoroan* ini dihaturkan dihadapan *Ida Bhatara Bhatari* yang berstana di *Kori Agung*. Makna dari dihaturkannya *tapakan mesoroan* ini adalah sebagai pembuka *lawangan* atau jalan yang mana nanti *Jero Keraman* akan keluar menuju *Jabe tengah* dengan melewati *Kori Agung* dan agar direstui serta dilancarkan dalam pelaksanaan *Matiti Suara*.

(d) Banten Segeh Agung.

Banten ini terdiri dari: 1) *segehan*, 2) beras *Sokan*, 3) *sekar*, 4) *daksina* dan 5) *tirta kangin*. Yang mana dari komponen di atas, akan dijelaskan isinya satu-persatu. Pertama, *segehan* yang letaknya di paling bawah terdiri dari: a) nasi berwarna hitam yang di tempatkan pada daun pisang yang dilipat sebanyak empat buah di letakkan menghadap ke arah utara, di atasnya diisi sebuah *merekah* dan *base tampin* yang berisi bunga; b) nasi berwarna putih yang ditempatkan pada daun pisang yang dilipat sebanyak lima buah yang diletakkan menghadap ke arah timur, di atasnya diisi sebuah *merekah* dan *base tampin* yang berisi bunga; c) nasi berwarna merah yang ditempatkan pada daun pisang yang dilipat sebanyak sembilan buah yang diletakkan menghadap ke arah selatan, di atasnya diisi sebuah *merekah* dan *base tampin* yang berisi bunga; d) nasi berwarna kuning yang ditempatkan pada daun pisang yang dilipat sebanyak tujuh buah yang diletakkan menghadap ke arah barat, di atasnya diisi sebuah *merekah* dan *base tampin* yang berisi bunga; e) nasi berwarna

brumbun yang ditempatkan pada daun pisang yang dilipat sebanyak delapan buah yang diletakkan ditengah-tengah, di atasnya diisi sebuah *marekan* dan *base tampin* yang berisi bunga.

Kedua, beras *sokan* terdiri dari: a) satu buah *tamas* yang terbuat dari *slepan* (janur yang sudah tua), b) beras secukupnya, c) satu buah telur bebek mentah, d) satu buah *linting* (terbuat dari kapas yang direkatkan pada *semat*) dan e) satu buah kelapa yang sudah tua.

Ketiga, sekar yaitu *samsam* yang terbuat dari daun *dadap* yang diiris, bunga *mitir* dan beras di bungkus menjadi satu dengan daun pisang. Keempat, *daksina* yang terdiri dari: a) sebuah kulit *daksina* atau *cerobong daksina* yang terbuat dari *slepan* (janur yang sudah tua), b) daun pisang secukupnya yang akan diletakkan di dalam *kulit daksina*, c) beras secukupnya, d) *tapak dara* yaitu *busung* yang di rangkai menjadi bentuk seperti tanda tambah, e) kelapa satu butir biasanya yang sudah tua, f) *kojong* yang terbuat dari *busung* sebanyak 7 buah yang masing-masing berisi: telur bebek, pisang mas, *werti* satu pasang, *kekaputan* (terbuat dari kulit jagung), *pis bolong* sebanyak 11 buah, *base tampin* yang telah diisi bunga di atasnya dan *cenigan* yang terbuat dari beberapa daun yang dijadikan satu yaitu : daun manggis, daun salak, daun tiblun dan daun cemara. Dirangkai menjadi satu kesatuan yaitu *daksina*. Namun, di atas *daksina* ini tidak terdapat sebuah pebersihan (*pesucian*). Kelima, *tirta kangin* adalah *tirta* yang berasal dari Pura *Jati* yang dipergunakan untuk menghaturkan *segeh agung*.

Alas dari *segeh agung* ini adalah *tempeh* atau *nyiru*, *daksinanya* ditaruh begitu saja pada tempat tersebut. Untuk menghaturkannya, biasanya *segeh agung* disertai dengan *penyambleh* (ayam atau itik atau babi yang belum dikebiri atau *kucit butuan*) yang masih hidup. Penggunaan *penyambleh* ini disesuaikan dengan kepentingan dan tempatnya. Waktu menghaturkan segala perlengkapan yang ada pada *daksina* itu dikeluarkan, sedangkan telur dan kelapanya dipecahkan diikuti dengan *pemotongan penyamblehan* dan akhirnya *tetabuhan*.

Upacara *segeh agung* tidak dilengkapi dengan *penyambleh*, ini dikarenakan *penyambleh* hanya boleh dipergunakan apabila *sesuhunan* (*Ida Bhatari Ulun-Danu*) akan *medal* atau *memargi*. *Segeh Agung* ini dihaturkan kepada *bala* iringan *Ida Bhatari* agar pada saat pelaksanaan *Matiti Suara* diberikan kelancaran dan tidak ada hambatan baik *sekala* maupun *niskala*.

Sekar ura adalah bagian dari tradisi *Matiti Suara*, karena diakhir acara *Matiti Suara Jro Guru Bedanginan* akan membawa *sekar ura* yang kemudian akan dihamburkan ke atas sesuai dengan arah mata angin. *Sekar ura* terdiri dari sebuah *bokor* yang berfungsi sebagai tempat dari *samsam* yang terbuat dari daun *dadap* yang diiris, bunga *mitir*, *pis bolong* dan beras. *Sekar ura* merupakan simbol *medana-dana* (bersedekah).

Pada saat *Jro Guru* atau *Jro Keraman Bedanginan* ini menaburkan *sekar ura* biasanya anak-anak kecil mengikuti beliau dan berlomba untuk mendapatkan *pisbolongnya*. Krama Desa Batur percaya bahwa *sekar ura* yang dihamburkan ke setiap arah mata angin merupakan perlambang dari kesejahteraan yang disebarkan oleh *Ida sesuhunan* dan *pis bolong* atau uang kepeng tersebut akan disimpan sebagai *pica* dari *Ida Bhatara*.

Dalam setiap pelaksanaan tradisi *Matiti Suara* dari generasi ke generasi mempergunakan seperangkat pakaian khusus, yang mana pakaian tersebut memiliki filosofi didalamnya.

Pakaian *Jro Guru Bedanginan* atau *Jro Keraman* pada saat *Matiti Suara* berbeda dengan pakaian sehari-harinya, jika pakaian sehari-harinya adalah baju putih, jas hitam, *kamen* dengan warna bebas, *saput poleng* dan *udeng* putih, sementara itu pakaian pada saat *Matiti Suara* adalah *kamen* hitam, *saput poleng* yang dikenakan sebatas dada serta *udeng* putih.

Warna *kamen* yang dominan hitam adalah warna Dewa *Wisnu* dan *Ida Bhatari Ulun Danu* juga dominan memakai warna hitam. Ini terlihat pada *payasan gedong* stana Beliau, yaitu dari *ngengider* sampai *pajeng* pun berwarna hitam. Warna hitam adalah perlambang *pertiwi*. *Udeng*

putih yang digunakan pada saat itu adalah melambangkan ke *luhur* atau ke atas, sedangkan *saput poleng* adalah perpaduan antara *kamen* hitam dan *udeng* putih yang berada ditengah-tengah, maknanya adalah adanya keseimbangan antara alam bawah dan alam atas sehingga terciptanya suatu keharmonisan.

C. Prosesi Tradisi *Matiti Suara*

Prosesi Upacara atau rangkaian didalam pelaksanaan tradisi *Matiti Suara* dalam upacara *Bhakti Papranian* sebagai rangkaian terakhir dari upacara *Ngusaba Kadasa* di Pura Ulun Danu Batur, desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai tanda masyarakat desa *Pakraman Batur* menerima kekuatan *Ida Bhatara* atau *Bhatari* melalui *yadnya Papranian* sebagai ungkapan tulus bahwa upacara *Betara Turun Kabeh* telah terlaksana *Sidaningdon* (sukses).

Runtutan atau rangkaian dari Upacara *Bhakti Papranian* yang di dalamnya memuat tradisi *Matiti Suara*, sebagai berikut:

(a) Laporan *Manggalaning Upacara*

Acara pertama ini yang memegang peranan adalah *Jro Gede*, bisa dilakukan oleh *Jro Gede Duwuran* atau *Jro Gede Alitan* sesuai dengan kesepakatan Beliau. Dalam acara ini *Jro Gede* lebih banyak menghaturkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu atas terlaksananya Upacara *Ngusaba Kadasa* di Pura *Ulun Danu Batur*. Pihak-pihak yang terdiri dari *para pengayah* baik yang berasal dari krama Desa Batur itu sendiri dan *para krama* Bali di luar Desa Batur yang telah mengabdikan diri baik secara tenaga maupun secara materi untuk terlaksananya upacara *Ngusaba Kadasa* ini.

(b) Laporan *Pengerauhan dan Penelasan*

Dalam acara ini yang memegang peranan adalah *Petinggi*. *Petinggi* yang dimaksud adalah seorang *perbekel* yang telah disucikan, artinya di samping telah memiliki tugas pemerintahan juga memiliki tugas di dalam desa adat. Hal-hal yang dilaporkan antara lain : 1) dana yang telah masuk ke dalam kas pura yang akan digunakan untuk pelaksanaan upacara *Ngusaba Kadasa*, 2) dana yang telah dikeluarkan dari kas pura, yang digunakan untuk melaksanakan upacara *Ngusaba Kadasa*, 3) dana hasil sumbangan para krama desa atau masyarakat Bali dan dari para donatur yang akan digunakan untuk kepentingan Pura Ulun Danu Batur dan 4) sisa kas Pura Ulun Danu Batur.

(c) *Dharma Wacana*

Acara yang ketiga yaitu pemberian *dharma wacana*. Menurut *Ngurah*, *Dharma Wacana* secara etimologi berasal dari dua kata yaitu "*dharma*" dan "*wacana*". "*dharma*" artinya kebenaran, hukum dan kewajiban, berasal dari akar kata "*dr*" yang artinya mengatur, menyangga. "*Wacana*" artinya ucapan, perkataan, keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, berasal dari akar kata "*vac*" yang artinya ucapan, bicara. Jadi, *dharma wacana* berarti suatu metode penerangan agama Hindu yang disampaikan pada setiap kesempatan di hadapan umat Hindu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang berisikan tentang kebenaran, hukum dan kewajiban sebagai umat Hindu guna mengatur kehidupannya.

Dalam acara *dharma wacana* ini, yang menjadi narasumber biasanya adalah perwakilan dari *Parisada* Hindu Provinsi Bali atau *Parisada* Hindu Pusat tergantung dari hadir atau tidaknya perwakilan. Tema dari *dharma wacana* yang diberikan biasanya seperti : *yadnya*, *Bhakti*, *ngayah* dan tidak jarang yang memberikan *dharma wacana* tentang hakekat dan *meprani* yang setiap tahun dilaksanakan oleh krama Desa Batur.

(d) **Tarian Perang-perangan**

Tarian perang – perangan yang melibatkan 2 orang *jojoran* dan 2 orang *jerobaris*. Tarian *Perang-perangan* ini adalah suatu tarian yang memiliki suatu makna yang dalam untuk kehidupan. Tarian ini dipentaskan tepat sebelum acara *Matiti Suara* dilaksanakan. Tarian ini ditarikan oleh empat orang yang dibagi kedalam dua sesi, masing-masing sesi terdapat dua orang penari. Pada sesi pertama ada dua orang penari *jojoran* yang merupakan simbolis masa *brahmacari*, namun yang menarik bukan seorang *brahmacari* melainkan seorang yang sudah mencapai *masagrhasta* (berumah tangga). Ini dikarenakan sistem *tempekan* yang ada di desa Pakraman Batur dimana setiap orang yang telah memasuki masa *grhasta* (menikah) diwajibkan untuk masuk ke dalam *tempekan* yang berbeda dengan seorang yang masih pada masa *brahmacari* seperti *lempek Jero Baris, Jero Gambel, Jero Batu, Jero Undagi dan Jero Pecalang*. Namun jika masih pada masa *brahmacari*, *tempekan* yang diperbolehkan yaitu *tempek Roban* yaitu khusus untuk anak laki-laki dan *tempek Daha Bunga* khusus untuk anak perempuan *tempekan* sebelas.

Pada sesi pertama ini ditarikan oleh *Tempek Jro Baris* yang masih muda. Sesi kedua ada dua orang penari *Baris Gede* dari *Tempek Jro Baris* yang menarik adalah *Jro baris* yang sudah *lingsir*. Ini merupakan simbol masa *grhasta* (berumah tangga). Makna dari tarian *Perang-perangan* adalah bahwasanya sebagai manusia baik di masa *brahmacari* maupun *grhasta* membutuhkan yang namanya perjuangan untuk mencapai kesejahteraan hidup, perang-perangan disini bukanlah perang melawan sesama namun perjuangan mencari kesejahteraan.

(e) **Matiti Suara**

Acara puncak tradisi *Matiti Suara* dilaksanakan. *Matiti Suara* berasal dari dua kata yaitu “*titi*” dan “*suara*”. “*titi*” artinya jembatan, “*suara*” artinya bunyi. Jadi, *titi suara* merupakan sebuah penyampaian suara atau *sabda* dari *sesuhunan* yang berstana di Pura Ulun Danu Batur kepada krama Desa Batur.

Matiti Suara juga memiliki arti *daging* titipan bunyi karya sastra seni tari budaya. *Matiti Suara* juga berarti *pewarah* atau *petuah sane patut anggen dasar swadarmaning dharma agama dan dharma negara* kepada krama Desa Batur *miwah* umat Hindu *sedharma*. *Titi suara* yang merupakan *sabda* dari *Ida Bhatara Sesuhunan* di pura *Ulun Danu Batur* diharapkan bisa menjadi landasan hidup dalam menjalani kehidupan bagi krama Desa Batur khususnya dan umat Hindu *sedharma* pada umumnya.

Matiti Suara ini dilaksanakan oleh seorang *Jero guru* atau disebut juga *Jero Keraman* yang sudah *diwinten* terlebih dahulu sebelum melaksanakan tradisi *Matiti Suara*. *Jro Guru Bedangian* adalah orang yang dituakan dalam desa, yang mana tugasnya di pura sangat penting, mulai dari menyiapkan *upakara* sampai menempatkan *upakara-upakara* tersebut di *setiap pelinggih-pelinggih* yang ada di areal pura. Di Desa Batur terdapat enam belas *Jero Guru* dengan empat tugas yang berlainan seperti : *Jero Pulai, Jero Pemumpunan, Jero Pesagian dan Jero Dis*. Yang mana pada saat tradisi *Matiti Suara* ini dilaksanakan, *Jero Guru Bedanginan* yang menjadi *Kesinomanlah* yang diperkenankan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi *Matiti Suara* ini dilaksanakan di *jabe tengah* pura Ulun Danu Batur, namun sebelum *Matiti Suara Jro Guru* melakukan persiapan terlebih dahulu di *jeroan* seperti : *ngaturang segehan agung, tapakan dan pejati di Kori Agung*, karena pada saat *Matiti Suara Jro Guru Bedanginan* akan ke *Jabe tengah* dengan melintasi *kori agung*. Pada saat *Matiti Suara Jro Guru* akan menyerukan *sabda* dari *sesuhunan* sebanyak tiga kali, para krama Desa Batur diminta untuk *mesuryak* (berteriak) sebagai tanda bahwa *sabda* telah diterima.

Bunyi dari *titi suara* yang merupakan sabda dari *Ida Bhatara* yang berstana di Pura Ulun Danu Batur antara lain :

- 1) *Jero krama desa lan umat Hindu pirengang becik-becik nggih : "Mule keliki mula biyu, mula abedik mupu liu, balik sinuryak"*.
"Apa yang kita tanam, walaupun sedikit akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Arti yang lebih luas yaitu apa yang kita tanam atau persembahkan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, atas kemurahan Beliau maka hasil yang kita dapat akan jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan, tentunya jika didasari atas sikap ketulusan hati".
- 2) *Jero krama desa lan umat Hindu pirengang becik-becik nggih : "baas barak baas putih, sane daak dadi sugih, balik sinuryak"*.
"Orang yang kekurangan (miskin) akan menjadi berlebihan (kaya) atau dari keadaan tidak punya menjadi punya. Arti yang lebih luas yaitu apabila manusia mau menjalankan sesuatu yang menjadi kewajiban kita di dunia dengan bekerja keras dan selalu berusaha maka hasil dari kerja keras karya sendiri itu akan didapatkan. Ini karena tidak ada hasil tanpa adanya perbuatan dan tidak ada orang yang memiliki segalanya tanpa bekerja keras".
- 3) *Jero krama desa lan umat hindu pirengang becik-becik nggih : "sampunang nganggen kriya upaya, dana upayane anggen, balik sinuryak"*.
"Dalam berbuat sesuatu pakailah kemampuan yang dimiliki diri bukan mengandalkan kemampuan orang lain. Arti yang lebih luas yaitu dalam hidup sebagai manusia tentu membutuhkan adanya interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan dalam situasi bekerjasama tersebut janganlah mengandalkan kemampuan orang lain untuk memenuhi segala keinginan, namun haruslah berusaha menggali kemampuan dari diri sendiri".
Jero Guru atau *Jero Keraman* yang telah menyampaikan *sabda* sebanyak tiga kali kemudian masuk *kejeroan* mengambil *sekar ura* dan menaburkan *sekar ura* itu ke atas sesuai dengan arah mata angin, biasanya juga anak-anak kecil mengikuti beliau pada saat menaburkan *sekar ura* ke arah mata angin dan berlomba untuk mendapatkan *pis bolongnya*. *Krama Desa Batur* percaya bahwa *sekar urayang* di tabur-taburkan ke setiap arah mata angin merupakan perlambang dari kesejahteraan yang disebarkan oleh *Ida Sesuhunan* dan *pis bolong* atau uang kepeng tersebut akan disimpan sebagai *pica* dari *Ida Bhatara*.
Hal ini mengingatkan tentang tarian *topeng Sidakarya* yang biasanya dipentaskan pada saat berakhirnya sebuah upacara. Tarian ini juga mempergunakan *sekar urayang* dihamburkan, yang mana *sekar ura* itu merupakan simbol *medana-dana* (bersedekah). Dengan kata lain menghamburkan *sekar ura* berarti menebarkan kesejahteraan pada umat manusia, sehingga terwujudnya *rahayuning jagat*.
- 4) Persembahyangan bersama yang diawali dengan *Puja Tri Sandya*
Acara keempat adalah persembahyangan yang dilakukan oleh seluruh warga Batur dan umat Hindu di Pura Ulun Danu Batur yang merupakan *Bhakti* penutup dari upacara *Ngusaba Kedasa* di pura Ulun Danu Batur. Diawali dengan *Puja Tri Sandya* yang dipimpin oleh *Jero mangku* pura Ulun Danu Batur dan diikuti krama Desa Batur dan umat Hindu *sedharma*. Setelah *Puja Tri Sandya* dilaksanakan persembahyangan bersama yang dipimpin oleh *Jero mangku* pura Ulun Danu Batur. Seperti persembahyangan pada umumnya mempergunakan sarana bunga, *kwangen*, dupa, *tirta* dan *bija*.

5) *Nglamunin Bhakti Papranian*

Acara ini adalah acara terakhir dari rangkaian *Bhakti Papranian*, dalam acara ini *banten prani* yang telah dihaturkan atau dipersembahkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa dilungsur* atau disantap bersama-sama dengan anggota keluarga yang ada di pura, jika ada anggota keluarga yang berhalangan hadir biasanya nama mereka disebut. Hal ini adalah sebagai bentuk rasa berbagi pada anggota keluarga. Tak jarang antara satu keluarga dengan keluarga lain saling memberikan lauk pauknya. Ini dikarenakan rasa kekeluargaan antara krama Desa Batur sangat erat dan harmonis.

D. Nilai Pendidikan Tradisi *Matiti Suara* dalam Masyarakat Desa Pakraman Batur Kintamani.

Saat ini korupsi di Indonesia sudah sangat mengawatirkan, walaupun telah diambil berbagai tindakan ternyata korupsi cenderung eksis dan terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Korupsi di Indonesia sudah membudaya. Semua pihak yang terkait dengan sebuah kasus korupsi seakan menutup mata dan lepas tangan seolah-olah tanpa terjadi apa-apa. Tindakan korupsi telah diakukakan oleh para eksekutif di negeri ini dari para pejabat eselon satu sampai kepada pejabat yang paling kecil seperti lurah dan kepala desa, kepala sekolah, bahkan pegawai rendahan. Berbagai bentuk kiat yang telah dilakukan oleh para koruptor di negeri ini, mulai dari proses penyusunan yang berjumlah puluhan ribu rupiah sampai pada kasus menggelapkan uang negara dengan jumlah miliaran bahkan mungkin triliunan. Jika dilihat dari segi moral dan etika, terjadinya praktek korupsi yang semakin marak tersebut kita dapat menilai bahwa kondisi Indonesia sekarang ini sangat menyedihkan. Korupsi masih menjadi kejahatan yang luar biasa dinegeri ini. Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah mengamanatkan agar penyelenggara negara lebih gencar memberantas korupsi, namun praktek-praktek korupsi tidaklah menjadi surut malahan semakin merajalela dan menggurita. Kita lebih banyak berdiskusi mengenai korupsi dari pada menyeret dan menghukum para koruptor tersebut.

Sangat sulit bagaimana kita dapat mengurai apa penyebab dari seluruh persoalan korupsi ini, bukan berarti tidak ada, karena begitu akumulatif dan bervariasi membentuk lingkaran masalah yang tak kunjung dapat dicari penyelesaiannya. Kesulitan yang paling krusial adalah dari mana kita harus mulai melangkah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melanda bangsa ini. Kiranya benar apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita bahwa: Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan semudah membat rumput, memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan kesimpulan serta *treatment* yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya dapat dicegah akan tetapi dikemudian hari tidak akan terjadi lagi (Romli Atmasasmita, 2004: 22). Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini masih sulit kita mengharapkan para penegak hukum untuk mampu memberantas korupsi karena hukum dikalahkan oleh kekuasaan. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan, dengan kekuasaan penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Jadi benar postulat dalam sosiologi hukum yang mengatakan bahwa “di negara berkembang, dalam perbenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang”. (Satjipto Rahardjo, 2003: 58).

Belajar dari realita yang ada, bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu virus yang telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat, marilah kita jadikan titik berangkat untuk menata, memperbaiki dan membangun kembali puing-puing nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan yang telah hancur. Karena dari titik ini kita kan dapat menyatukan apa yang kita dambakan dan apa yang kita impikan dalam menanggulangi masalah korupsi. Kiranya visi yang harus kita emban

adalah; virus penyakit korupsi yang menyerang seluruh lapisan masyarakat kita, harus dapat dicegah dan diberantas, agar dikemudian hari tidak akan terjangkit lagi di bumi Indonesia yang kita cintai ini.

Dalam mewujudkan dambaan dan impian dalam memberantas korupsi tersebut, lalu apa yang hendak kita lakukan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan harapan?. Harus ada langkah awal sebagai titik beranjak, yang dapat dijadikan pegangan, bahwa parahnya penyakit korupsi yang menimpa bangsa kita tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mengapa demikian? Inilah hakekat sebenarnya dari kehidupan manusia. Manusia sebagaimana dikatakan oleh Edmund Leach adalah mahluk yang lebih bersifat kultural dari pada natural, berarti selalu merencanakan kehidupan yang lebih baik. Berbudaya berarti mencintai perubahan, berbudaya berarti selalu berada dalam kehidupan yang mengalir. Dalam pembangunan dunianya manusia selalu menggunakan kemampuan dirinya untuk memilah dan memilih, mulai dari mana ia harus melangkah (Adam Podgorecki, 1987: 30). Manusia akan menetapkan suatu landasan berpijak sebagai langkah awal dari apa yang mereka anggap baik dan benar, dalam realitas kehidupannya, seperti yang dijelaskan oleh Liek Wilardjo tentang proses titik berangkat dari realita (*das sein*) menuju ke desiderata (*das sollen*) (Liek Wilardjo, 2003: 3). Melalui hal itu, kita coba mulai melangkah untuk menata dan menyusun langkah awal dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang semakin parah.

Salah satu gerak langkah yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi adalah dengan menggali potensi kearifan lokal milik bangsa kita sendiri. Nilai kearifan lokal yang sarat dengan pendidikan anti korupsi patut kita gali, patut kita angkat, kita kaji, dan kita dipelajari sebagai warisan luhur bangsa.

Dalam melakukan kajian terhadap nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang hidup dalam masyarakat, diperlukan kajian antropologis, sosiologis dan filosofis. Dengan kajian tersebut, diharapkan ditemukan mutiara-mutiara yang hilang dari kearifan budaya tradisional yang masih hidup dalam masyarakat. Terkait dengan kajian peran budaya tradisional, Fritjof Capra mengatakan bahwa; kearifan adalah merupakan ciri khas kebudayaan-kebudayaan tradisional. Kearifan budaya tradisional tersebut didasarkan atas penghormatan yang tinggi pada kearifan alam. Akan tetapi secara menyedihkan kearifan budaya tradisional tersebut telah diabaikan di dalam masyarakat yang terlalu rasional dan termekanisasi (Fritjof Capra, 2002: 468-469).

a. Prinsip-prinsip Pendidikan Anti Korupsi dalam Tradisi *Matiti Suara*

Salah satu kearifan budaya tradisional yang sarat dengan nilai nilai dan prinsip prinsip pendidikan anti korupsi adalah tradisi *Matiti Suara*. Tradisi *Matiti Suara* adalah suatu tradisi yang telah berlangsung sejak jaman lampau dalam kehidupan masyarakat desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Tradisi ini dilaksanakan setiap setahun sekali pada *Sasih Kedasa* (sekitar bulan April) di Pura Batur.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam Tradisi *Matiti Suara* dalam masyarakat desa Pakraman Batur, Kintamani Bangli sangat sarat dengan pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat diketahui dari prinsip prinsip yang disepakati dan dilaksanakan dalam tradisi *Matiti Suara* tersebut, seperti: prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, aturan main yang jelas, dan kontrol terhadap aturan main oleh masyarakat.

a) Prinsip Transparansi dan Kejujuran dalam Tradisi *Matiti Suara*

Prinsip transparansi mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk, sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan seluruh

sektor kehidupan publik mensyaratkan adanya transparansi, sehingga tidak terjadi distorsi dan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran.

Dalam tradisi *Matiti Suara* prinsip ini sangat jelas terlihat adanya keharusan dari keterlibatan *krama adat* (anggota masyarakat desa adat) dalam segala bentuk aktivitas pembangunan dan ritual mulai dari proses penganggaran, penyusunan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan sampai evaluasi. Semua proses kebijaksanaan dilakukan secara terbuka dan jujur. Sektor sektor yang harus melibatkan *krama adat* jelas tampak dalam hal-hal sebagai berikut:

- (a) *Krama adat* dilibatkan dalam proses penganggaran setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pakraman Batur baik itu pembangunan maupun ritual, penganggarnya direncanakan dari bawah (*bottom up*). Melalui tradisi *Matiti Suara*, *krama adat* (anggota masyarakat desa adat) di berikan kesempatan terlibat dan berpartisipasi dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian terhadap kinerja anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan masyarakat melakukan kontrol terhadap pengelolaan anggaran.
- (b) *Krama adat* dilibatkan juga proses penyusunan kegiatan pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggatan pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
- (c) *Krama adat* diikut sertakan dalam proses pembahasan tentang pembuatan dan strategi penggalangan dana pembangunan.
- (d) *Krama adat* dilibatkan dalam proses pengusulan dan pembahasan tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan pembangunan yang dilakukan dalam wilayah desa Pakraman Batur. Keterlibatan *krama Desa* ini mulai dari pelaksanaan, pengerjaan, pelaporan pertanggung jawaban secara teknis dari pembangunan.
- (e) *Krama adat* dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggung jawaban secara administrasi. Evaluasi dilakukan dalam *paruman* desa *Pakraman* (rapat desa *Pakraman*) sebagai pertanggung jawaban secara teknis dan fisik dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

b) Prinsip Akuntabilitas dalam Tradisi *Matiti Suara*

Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas sebagai prinsip pencegahan tindak korupsi membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa peraturan-peraturan maupun komitmen dan dukungan masyarakat. Keberadaan peraturan secara otomatis mengharuskan adanya akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas ini telah dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan *krama* desa Pakraman Batur Kintamani Bangli, hal ini jelas terlihat dari agenda-agenda yang harus ditempuh untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Agenda-agenda yang dilakukan oleh *prajuru* desa tersebut antara lain:

- (a) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang berjalan selama ini dilaksanakan oleh masyarakat desa Pakraman Batur adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam *Purana Pura Batur* dan *awig awig* desa adat. Pertanggung jawaban dilakukan oleh perangkat desa adat, hal tersebut dilakukan sebelum upacara *Matiti Suara*.

- (b) Adanya sistem informasi pelaporan melalui laporan setiap bulan dan pelaporan setiap 6 bulan. Pelaporan ini disampaikan dalam *paruman* desa *adat*. Pertanggungjawaban dilakukan pula dalam *paruman* desayang dihadiri olehseluruh*krama* desa. Melalui *paruman* desa ini, masyarakat memiliki akses mengetahui dan mengkritisi penggunaan anggaran dalam pembangunan yang dilaksanakan.
- (c) Semua akativitas yang dilakukan dilaporkan juga kepada Bupati Bangli.
- (d) Berkenaan dengan upaya-upaya evaluasi, tidak hanya terbatas sebagai penilaian terhadap kinerja administrasi dan proses pelaksanaan, tetapi evaluasi juga dilakukan terhadap dampak dan manfaat yang diberikan oleh setiap kegiatan pembangunan dan ritual kepada warga masyarakat.

c) Prinsip Kewajaran dalam Tradisi *Matiti Suara*

Prinsip kewajaran ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran dalam kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran kekuasaan lainnya. Oleh karenanya sepatutnyalah para perumus kebijakan pembangunan menekankan pentingnya prinsip kewajaran dalam proses penganggaran hingga pelaksanaanya.

Prinsip kewajaran ini telah dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan krama adat desa *Pakraman* Batur Kintamani Bangli, dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh *prajuru* desa khususnya dalam proses penganggaran. Langkah langkah tersebut antara lain:

- (a) *Krama adat* desa *Pakraman* Batur sangat disiplin dan cermat dalam mempertimbangkan berkesinambungan dalam pembangunan. Oleh karenanya setiap akan melaksanakan suatu kegiatan terlebih dahulu dilakukan *paruman* (rapat desa) dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran secara cermat sehingga nantinya tidak terjadi pengeluaran yang melampaui batas kemampuan *krama* adat.
- (b) Fleksibilitas yaitu adanya diskresi tertentu dalam konteks efisiensi dan efektifitas (prinsip tak tersangka, perubahan, pergeseran, dan di sentralisasi manajemen).
- (c) *Krama adat* desa *Pakraman Batur* sangat cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan dan ritual dilakukan, hal ini dilakukan guna menghindari adanya defisit anggaran.
- (d) Kejujuran setiap *krama* adalah sesuatu yang sangat diharuskan dalam tradisi *Matiti Suara*. Dengan kejujuran, maka segala hal yang bersangkutan dengan pembangunan, baik mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaanya harus sesuai dengan apa yang di tetapkan. Tidak lagi terjadi nantinya bahwa apa yang menjadi kenyataan di lapangan berbeda dengan apa yang telah di rumuskan. Semuanya harus wajar, harus jujur, dan berjalan dengan seperti apa yang di rencanakan dan di tetapkan.
- (e) Melalui tradisi *Matiti Suara* sistem informasi pelaporan dilakukan secara teratur sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengembalian keputusan.

Dengan dilaksanakan langkah langkah kewajaran dalam seluruh aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa *Pakraman* Batur maka menjalarnya praktek praktek ketidakwajaran, baik berupa penipuan maupun penyimpangan dapat di tekan dan dihindari. Prinsip kewajaran yang dilakukan dalam tradisi *Matiti Suara* ini dapat mengarahkan aktivitas pembangunan dan ritual dapat berjalan secara wajar, jujur, dan sesuai dengan prosedur yang telah di sepakati bersama dalam *paruman* desa.

d) Prinsip Aturan Main Anti Korupsi dalam Tradisi *Matiti Suara*.

Aturan main adalah merupakan salah satu sarana dalam mengatur tata interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, demi terwujudnya suatu keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Aturan main anti korupsi bertujuan untuk mengendalikan dan mempersempit ruang gerak perilaku korupsi, karena perilaku korupsi akan dapat berdampak sangat negatif dan membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat serta dapat merusak nilai nilai moralitas. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karenanya korupsi perlu dikendalikan dan dikontrol oleh aturan main atau kebijakan yang mempersempit ruang gerak perilaku korupsi.

Dalam tradisi *Matiti Suara* aturan main yang terkait dengan usaha mempersempit peluang perilaku korupsi dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

- (a) Isi aturan main yang terkait dengan kebijakan anti korupsi dalam tradisi *Matiti Suara* masyarakat desa *Pakraman* Batur dituangkan dalam *awig awig* desa adat. Aturan aturan tentang anti korupsi tersebut sengaja dituangkan dalam *awig awig* desa adat dimaksudkan agar aturan aturan itu dapat lebih efektif dan lebih ditaati oleh anggota masyarakat.
- (b) Aturan aturan anti korupsi yang dituangkan dalam *awig awig* adat tersebut di rancang dan dibuat oleh *prajuru desa pakraman* yang terdiri dari mereka yang dipilih dan dituakan serta disegani dalam masyarakat desa adat. Setelah rancangan aturan selesai dibuat, selanjutnya aturan itu di mintakan persetujuan *krama adat* dalam *paruman desa*. Dengan mekanisme pembuatan aturan yang demikian diharapkan kualitas aturan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga biasa dilaksanakan dan ditaati oleh warga.
- (c) Dalam menjalankan kebijakan pembangunan dan ritual yang dilakukan dalam tradisi *Matiti Suara* dapat berjalan dengan baik karena dilaksanakan dan didukung oleh *prajuru adat* yang memiliki integritas dan dipercayai oleh warga masyarakat, sehingga kesenjangan, ketidakadilan, dan bentuk penyimpangan lainnya dapat dihindari.
- (d) Kebijakan yang dilakukan dalam tradisi *Matiti Suara* adalah dilandasi dengan nilai nilai ajaran agama Hindu, sehingga semua *krama* desa memiliki keyakinan dan partisipasi untuk mentaati aturan atauran/kebijakan yang telah dicanangkan. Tingkat partisipasi *krama* desa (warga desa) ini akan dapat meningkatkan partisipasi dalam pemberantasan korupsi.

e) Prinsip Kontrol Terhadap Aturan Main dalam Tradisi *Matiti Suara*

Kontrol adalah suatu yang sangat prinsip dalam pendidikan anti korupsi. Kerena dengan kontrol maka rakyat ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pembangunan. Keterlibatan rakyat juga harus dimulai ketika anggaran itu di kelola di lapangan, pada saat di turunkan dalam bentuk pelaksanaan. Peran dan keterlibatan rakyat dalam melakukan pengawasan dan kontrol pada saat implementasi sangat penting untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyimpangan anggaran.

Prinsip kontrol terhadap aturan main ini telah dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan *Karma Adat* Desa Batur Kintamani Bali, hal ini terlihat dari langkah langkah yang dilakukan oleh *Parajuru Adat* yang secara intensif control dan pengawasan terhadap kebijakan mulai proses pembuatan sampai evaluasi. Kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh *Krama Adat* antara lain : 1) Kontrol dan pengawasan terhadap sumber sumber pemasukan yang dikelola

oleh *prajuru adat* (pimpinan adat), 2) Kontrol dan pengawasan terhadap tata cara penarikan dana dan pengolalanya, 3) Kontrol dan pengawasan terhadap pertanggung jawaban pekerjaan di lapangan, baik secara administrasi maupun kualitas pekerjaan, 4) Kontrol dan pengawasan terhadap limit waktu dalam penyelesaian pembangunan serta pertanggung jawaban teknis terhadap kualitas setiap pekerjaan yang telah dikerjakan.

b. Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Tradisi *Matiti Suara*

Di samping prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi seperti terurai di atas, dalam tradisi *Matiti Suara* terdapat pula nilai-nilai pendidikan anti korupsi seperti nilai Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

(a) Nilai Kejujuran dalam Tradisi *Matiti Suara*

Jujur artinya perilaku yang lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Nilai-nilai kejujuran dalam tradisi *Matiti Suara* dapat dilihat dari perilaku dari masing-masing kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Para *Jero Pakraman Paduluan* (petugas piket desa) yang bertugas *nganggain desa* (melaksanakan tugas desa dalam berbagai aspek kehidupan terutama tugas yang terkait dengan ritual keagamaan) melaksanakan tugasnya secara jujur dan tulus ikhlas. Karena tugas yang diemban dimaknai sebagai suatu kewajiban yang diwariskan oleh leluhur yang mentradisi dari jaman lampau.

Menurut penuturan tokoh *Jero Gede Alitan* (Pindadita Pura Batur), bahwa nilai kejujuran yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Batur adalah dilandasi oleh nilai ajaran Agama Hindu yaitu ajaran *Tri Kaya Pari Sudha* (berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik). Dalam ajaran *catur Purusa Artha* juga mengajarkan agar berperilaku jujur dalam mencari artha (kekayaan), untuk mendapatkan artha maka seseorang harus mendapatkannya dengan jalan *Dharma* (jalan yang benar dan jujur). Bila harta didapat dengan jalan yang menyimpang dari *dharmma* maka sebenarnya seseorang yang demikian telah melakukan sesuatu yang sia-sia dan dosa.

Nilai kejujuran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Batur Kintamani juga dilandasi dengan kepercayaan akan *Hukum Karma Phala*, bahwa semua perbuatan yang tidak sesuai dengan *dharmma* akan mendapatkan hasil yang setimpal, walaupun tidak kelihatan pada kehidupannya secara empiris saat ini tapi biasa akan mendapatkan hukuman pada kehidupannya yang akan datang. Oleh karenanya hendaknya manusia berlaku tidak menyimpang dari petunjuk *dharmma* karena akibat ketidakjujuran itu sangat berat hukumannya dan hukuman itu akan dijatuhkan dari suatu pengadilan *niskala* (pengadilan yang tidak kelihatan).

(b) Nilai Kedisiplinan dalam Tradisi *Matiti Suara*

Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Nilai ketaatan dalam tradisi *Matiti Suara* terlihat dari perilaku disiplin serta penuh tanggung jawab dari masing-masing kelompok kerja yang terdiri dari empat kelompok yaitu: Kelompok pertama *Dis*: tugasnya tukang belanja keperluan desa baik upacara maupun untuk masak. Sesuai dengan RAB dan dilaporkan bukti belanjanya (nota), dilaporkan kepada *Jero Pakraman*. Kelompok dua: *Pemumpunan* tugasnya memasak sesuai dengan bahan yang ada, dan permintaan dari kesinoman, petugas *Pemumpunan* menerima dan melaksanakan tugasnya dengan penuh iklas dan tanggung jawab kepada *Jero Pakraman*. Kelompok tiga: *Pulai* tugasnya merencanakan karya berdasarkan agenda karya yang telah ditetapkan oleh *krama* desa. Petugas *Pulai* menerima melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada *jero pakraman*, Kelompok empat *Pesagi* tugasnya menghadirkan makanan, aturan

yang telah selesai dikerjakan oleh *pamumpunan*. Petugas *Pesagi* menerima melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut dengan tulus ikhlas dan tanggungjawab kepada *Jero Pakraman/krama*.

Kedisiplinan juga ditunjukkan dari kehadiran dan kekompakan petugas dalam melakukan tugasnya, jika diantara anggota kelompok ada halangan maka yang bersangkutan harus minta ijin kepada *Jero Pakraman*. Nilai kedisiplinan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa *Pakraman Batur* adalah dilandasi oleh nilai ajaran Agama Hindu. Kitab *Artharva Veda* ditegaskan bahwa: "...hendaknya kamu bekerja dengan kesungguhan, kedisiplinan dan kejujuran. Jika kamu bekerja dengan kesungguhan, kedisiplinan, dan kejujuran. Maka hasil kerja yang akan diperoleh akan berlimpah ruah seribu kali..."(Atharva Veda.III.24.5). Kedisiplinan ini juga dilandasi oleh ajaran *Tri Kaya Parisudha* yaitu ajaran yang mengajarkan kepada umat Hindu agar melakukan perbuatan yang: 1) *Manacika Parisudha* yaitu memiliki pikiran yang suci/baik (misalnya: tidak dengki pada milik orang lain, menerima buah hasil dari perbuatannya, kasih sayang pada semua makhluk), 2) *Wacika Parisudha* yaitu ucapan yang benar (tegas, tidak berbohong, tidak kasar, menepati janji), artinya seseorang itu harus disiplin dalam bertutur kata. 3) *Kayika Parisudha* artinya berbuat yang benar, seseorang hendaknya melakukan perbuatan sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan.

(c) Nilai Tanggung Jawab dalam Tradisi *Matiti Suara*

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nilai tanggung jawab dalam tradisi *Matiti Suara* terlihat dari rangkaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seluruh warga yang bertugas melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Rangkaian pertanggungjawaban itu adalah:

- 1) Setiap satu bulan tugas yang dilakukan oleh *Jero Pakraman* (1 bulan) dilakukan pertanggungjawaban melalui mekanisme, seluruh aktivitas beserta bukti buktinya dilaporkan/diperiksa oleh *petinggi* (3 *perbekelan* Batur yaitu Selatan, Tengah, Utara)
- 2) Setelah semua tugas dilaksanakan oleh *Jero Pakraman* (lima regu *kasinoman*) langkah selanjutnya semua aktivitas yang dilakukan dipertanggungjawabkan pada *paruman* desa yang dihadiri oleh 11 *tempek* setiap Hari Galungan.
- 3) *Pakraman Bedauhan/pesangkepan pesaja pesaji pati kadwisawa* (rapat purnama, *tilem*, dan *tumpek*) hakekat dari nama *pesangkepan* adalah untuk mengevaluasi kejujuran, tanggung jawab setiap aktivitas yang dilakukan.
- 4) Rapat dilakukan setiap bulan purnama yang isinya melaporkan pekerjaan yang sudah selesai, yang belum selesai kepada *Jero Pakraman Bedauhan* dan *Jero Pakraman Bedanginan*
- 5) Rapat dilakukan setiap bulan *tilem* yang isinya melaporkan pekerjaan yang sudah selesai, yang belum selesai kepada *Jero Pakraman Bedanginan*
- 6) Rapat gabungan *Pakraman Bedauhan* dan *Bedanginan* diadakan setiap *Tumpek* di balai *pengkemkem* (balai *pesamuan/paruman*) yang dihadiri oleh seluruh petugas *Dis*, *Pamumpunan*, *Pulai*, *Pesagi*, (16 orang) *petinggi* (1 orang), *Manggala Desa* (6 orang/desa sareng enem: *Jero Gede2* (*Duuran/Bukitan dan Alitan/Bukitan*), *Jero Balian 2*(Desa *Kajanan dan Kelodan*), *Jero Penyarikan 2* (*Duuran dan Alitan*), *Jero Mangku 22* orang. Jumlah peserta semua 45 orang (*pengulu desa setimaan*).
- 7) Penanggulangan/pemberantasan korupsi: dikenakan sanksi berupa permohonan maaf dihadapan *Ida Betari Danu* dan *Kahyangan Tiga Desa /Tuhan yang Maha Esa* dengan sarana upacara sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan yang disaksikan oleh seluruh masyarakat. Yang menjatuhkan sanksi *Jero Pkraman*. Ketika pelaku

melaksanakan kewajibannya hukuman mereka wajib melapor kepada *Jero Pakraman* (bagi pelaku yang masih hidup). Manakala pelaku sudah meninggal, maka hukuman dilakukan oleh ahli warisnya/keturunannya melalui mekanisme : melapor kepada *Jero Pakraman*, melaporkan dan disaksikan oleh *Jero Penyarikan* di *Bale Pemegat* (di *jaban pura*) dengan ritual khusus (*benang pemegat/* yang fungsinya adalah seluruh kesalahan telah dilunasi).

Menurut penuturan *Jero Pakraman* (Koordinator Kelompok Kerja) bahwa rasa tanggung jawab terhadap segala pebutan atau pekerjaan yang diembannya ini tumbuh dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa *Pakraman* Batur karena mereka percaya akan ajaran *Hukum Karma*. Hukum Karma menetapkan agar manusia berbuat sesuai dengan *dharma*-nya dan sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Setiap perbuatan dipercaya akan membawa buah dari perbuatannya itu. Pada saat meninggal jiwa manusia masih penuh dengan buah-buah perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya, demikian juga setelah mereka *reinkarnasi* (lahir kembali). Masyarakat desa *Pakraman* Batur sangat percaya bahwa kalau mereka berbuat baik maka pada kelahiran berikutnya mereka akan lahir dalam tingkat yang lebih baik dari kelahiran sebelumnya. Kalau perbuatan buruk dilakukan maka kelahiran berikutnya akan bisa lebih buruk lagi bahkan bisa lahir kembali sebagai binatang. Mereka percaya bahwa manusia akan hidup terus berganti keadaan sesuai karmanya.

Menurut mereka *hukum karma* dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu: 1) *Sancita Karma* yaitu hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan yang sekarang, 2) *Prarabda Karma* yaitu hasil perbuatan kita pada kehidupan kita saat ini tanpa ada sisanya, 3) *Kriyamana Karma* yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat ini dan harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Artinya segala baik buruk suatu perbuatan akan membawa akibat tidak saja dalam kehidupan sekarang ini, tetapi juga setelah di kehidupan di akhirat kelak bahkan sampai menjelma kembali sebagai manusia.

Nilai tanggung jawab terkait dengan pendidikan anti korupsi terlihat juga dari kepercayaan masyarakat tentang dalam kitab *Sarasamuscaya* yang menyatakan bahwa orang yang tidak pernah mencuri barang milik orang lain, baginya tidak ada yang patut ditakuti, mereka selalu gembira tidak pernah was-was kemanapun perginya. Sebaliknya kalau dia mencuri milik orang lain kemanapun mereka pergi pasti merasa takut seperti seekor kijang atau binatang liar masuk ke perkampungan. Artinya jika seseorang itu melakukan perbuatan mencuri atau korupsi maka hidupnya tidak akan pernah tenang dan selalu merasa ketakutan dan di kejar-kejar dosa.

BAB IV PENUTUP

Empat hal yang difokuskan dalam penelitian ini adalah

- a) Bentuk-Bentuk Kekunaan yang memiliki fungsionalitas tinggi dalam kehidupan masyarakat desa *Pakraman* Batur Kintamani antara lain: *Danau Batur*, *Gunung Batur*, *Pura Ulun Danu Batur*, *Pura Batur*, *Desa Bintang Danu*, *Upacara Ngusabha*, *Tradisi Matiti Suara* tidak bisa dipisah-pisahkan.
- b) Pelaksanaan tradisi *Matiti Suara* yang dilakukan oleh masyarakat Desa *Pakraman* Batur Kintamani merupakan upacara yang dilakukan secara rutinitas yang dilaksanakan dalam *Ngusabha* Desa sasih kedasa. Pelaksanaan tradisi *Matiti Swara* ini dilaksanakan oleh masyarakat dan *Jero Kraman Bedanginan* yang menyampaikan *sabdha* dari *sesuhunan* dari Ida Betara yang berstana di Pura Ulun Danu Batur. Isi *sabdha* tersebut untuk mengingatkan manusia (umat Hindu se-Dharma) senantiasa berbuat *dharma* dan berjanji kepada diri sendiri hanya akan memakai kemampuan yang ada di dalam diri untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.
- c) Alasan masyarakat desa *Pakraman* Batur Kintamani setiap mengakhiri upacara *Sasih Kadasa* selalu melakukan tradisi *Matiti Suara*, karena ada keyakinan bahwa melalui tradisi *Matiti Suara* ini masyarakat Desa Batur diharapkan dapat meningkatkan kualitas *Sradha* dan *Bakti* kepada Ida Hyang Widhi Wasa. Ungkapan *Sradha Bakti* yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan *Matiti Suara* ini semakin memperkuat keyakinan dan kepercayaan kepada Kemahakuasaan Ida Hyang Widhi Wasa, sehingga masyarakat termotivasi melakukan pekerjaan secara jujur, tulus ikhlas, dan rasa tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi.
- d) Pendidikan anti korupsi dalam tradisi *Matiti Suara* masyarakat Desa Batur Kintamani ini terlihat dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam tradisi *Matiti Suara* tersebut. Adapun prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi dalam tradisi *Matiti Suara* antara lain: (1) prinsip transparansi, (2) prinsip akuntabilitas, (3) prinsip kewajaran, (4) prinsip aturan main, dan (5) prinsip kontrol terhadap aturan main. Sedangkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam tradisi *Matiti Suara* antara lain: (1) nilai kejujuran, (2) nilai kedisiplinan, dan (3) nilai tanggung jawab.

Rekomendasi

Mengingat tradisi *Matiti Suara*, sarat dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi saat mendedikasikan pengabdian diri pribadi untuk kemuliaan orang banyak, penting dilestarikan dan dipelajari. Penelitian dengan topik "Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tradisi *Matiti Suara* di desa *Pakraman* Batur, Kintamani" ini peneliti memahami sebagai nilai kearifan bangsa dari Bali patut dikenal dan diapresiasi, terlebih saat mana bangsa Indonesia sedang menghadapi teror korupsi yang dilakukan oleh anak bangsanya sendiri. Sari pati hasil penelitian ini menjadi menarik karena dapat dirumuskan dan direkomendasi kepada pemegang kebijakan atau siapapun yang memerlukan. Adapun rumusan rekomendasi yang dimaksudkan dan harus ditindaklanjuti, adalah sebagai berikut :

- a) Mengingat tradisi *Matiti Suara*, sarat dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi saat mendedikasikan pengabdian diri pribadi untuk kemuliaan orang banyak, penting dilestarikan dan dipelajari.

- b) Prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam tradisi *Matiti Suara* patut dikenal, dipahami, dan diapresiasi sebagai kearifan bangsa dari Bali. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam tradisi *Matiti Suara* sangat relevan diaktualisasikan untuk memperkecil merebaknya praktek-praktek korupsi di tanah air.
- c) Melalui pengenalan, pemahaman, dan apresiasi terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam tradisi *Matiti Suara* pada masyarakat desa *Pakraman Batur Kintamani* dapat mendorong upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai pendidikan anti korupsi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d) Perlu dilakukan penelitian tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada tradisi-tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bali lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Alfathri. 2006. *Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Angkasa, IG Kingkin Teja. 2010. *Pendidikan Nasional. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila*. Kompas.com.<http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=pendidikan+karakter+di+Indonesia&d=270239944821...12/16/2010>
- Astana, Made & C.S. Anomdiputro (penerjemah). 2005. *Kautilya (Canakya) Arthashastra (Masalah Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya dsb.)*. Surabaya: Paramita.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1975. *Kebudayaan Bali*. In Koentjaraningrat (ed). 1975. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. pp: 279-299. Jakarta; Djambatan.
- Covarubias, Miguel. 1956. *Island of Bali*. New York: Alfred A. Knoff.
- Chris. (ed). 007. *Membongkar Budaya. Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*. Pp:295-300. Jakarta: Kompas.
- Geertz, Clifford. 1959. Form and Variation in Balinese Village Structure. *American Anthropologist* (61).991-1012.
- Geertz, Clifford. *Person, Time and Conduct in Bali. The Social Nature of Thought*. http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Person_Time_Conduct.htm. 20/07/2012.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leliweri, A. 2005. *Prasangka & Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Setelah Kebenaran dan Kepastian dihancurkan. Masih Adakah Tempat Berpijak bagi Ilmuwan. Sebuah Uraian Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Bogor: Aka Demia.
- Margi, I Ketut. 2012. *Pemertahanan Identitas Etnik dan Implikasinya terhadap Hubungan Intern dan Interetnik di Desa Pengastulan, Buleleng, Bali*. Disertasi. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Messwati, Elok Dyah. 2007. *Membenahi Pendidikan yang Kedodoran. Dalam Verdiansyah, Nurokhim, Bambang. Membangun Karakter dan Watak Bangsa Melalui Pendidikan Mutlak Diperlukan*. <http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/Article..16/12/2010>
- Piliang, Yasraf Amir. 2006. *Antara Minimalisme dan Pluralisme. Manusia Indonesia dalam Serangan Posmodernisme*. Dalam Adlin Alifathri (ed) 2006. *Menggeledah Hasrat. Sebuah Pendekatan Multiperspektif*. Pp: 1-43. Bandung: Forum Studi Kebudayaan Jurusan Seni dan Desain ITB.
- Radendra S. Ida Bagus. 2005. *Ekonomi dan Politik Dalam Arthashastra*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Rao, M.V.Krishna. 2003. *Studies In Kautilya*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Rajasa, M. Hatta. 2009. *Karakter Bangsa Sebagai Modal Sosial Untuk Menghadapi Tantangan Global*. <http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=karakter+bangsa+Indonesia&d=4695589110351848&...12/16/2010>
- Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. <http://webcahce.Googleusercontent.com/search?hl=id&q->

cache:FAvIoonjCjYJ:http:ww ...12/16/2010.

Ritzer, George. 2006. *The Globalization of Nothing. Mengkonsumsi Kehidupan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sudrajat, Akhmad. 2010. *Tentang Pendidikan Karakter*.

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/>

Sutjiati Beratha, Ni Luh, I Wayan Ardika dan I Nyoman Dhana. 2010. *Dari Tatapan Mata ke Pelaminan sampai di Desa Pakraman. Studi tentang Hubungan Orang Bali dengan Orang Cina di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Sutrisno, Mudji. 2008. *Ranah-ranah Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Swasono, Sri-Edi. 2010. Colloquium in Honor of Dr Ann Dunham Soetoro and Prof. Mubyarto: Mutualisme and Brotherhood. Paper presented at *Wisdom 2010. World Conference on Culture, Education and Science and Colloquium in Honor of Dr Ann Dunham Soetoro and Prof. Mubyarto*. Yogyakarta. 5-8 December 2010.

Verdiansyah, Chris. 2007. *Membongkar Budaya. Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*. Jakarta: Kompas

Widiastono, Tony D. 2007. Guru Berkualitas Sekedar Harapan. Dalam Verdiansyah, Chris.(ed). 2007. *Membongkar Budaya. Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*.pp: 289-294. Jakarta: Kompas.

Wikipedia Indonesia. 2012. "Korupsi" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>, akses 1 Desember 2012

Wong, Suwadi, Peter. 2007. *Kultur Bhineka Tunggal Ika sebagai Karakteristik Bangsa Indonesia di Era Globalisasi: Sebuah Tinjauan Injili*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=cache:wDLOU927zl:http:w...16/12/2010>

LAMPIRAN



KORI AGUNG PURA BATUR, LOKASI PENELITIAN



TIM PENELITIAN SEMBAHYANG BERSAMA



KEGIATAN VEIFIKASI HASIL PENELITIAN



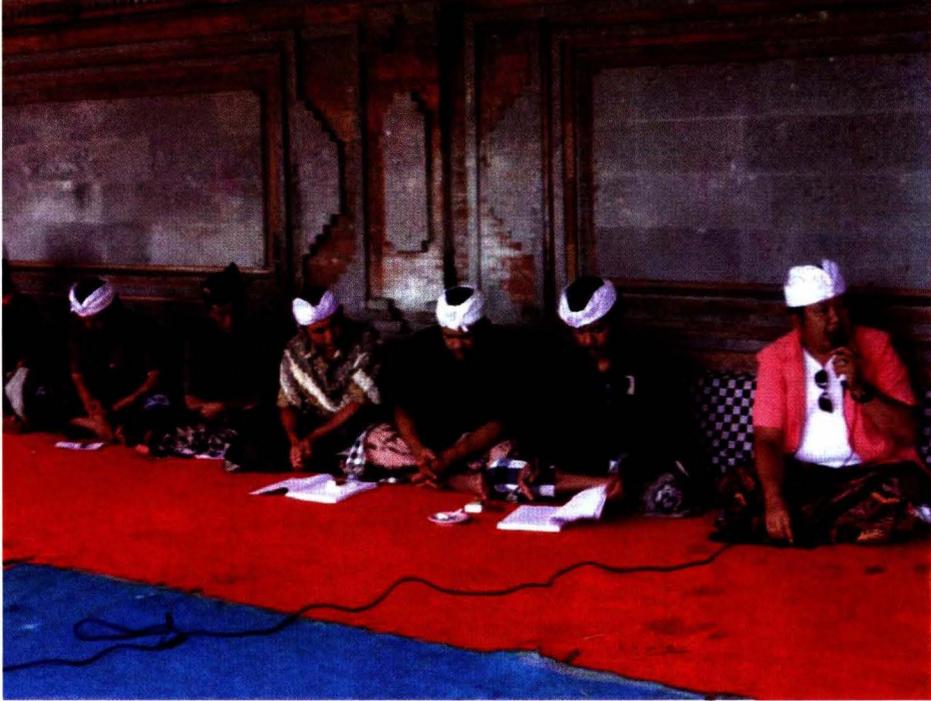
DIAWALI DENGAN NGATURANG PIUNING OLEH JEO MANGKU



DIAWALI DENGAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN OLEH TIM



ASISTEN I SETDA BANGLI (BAJU HITAM) DAN JERO GEDE ALITAN



PERBEKEL BATUR SELATAN (BAJU MERAH) BERPERAN SERTA AKTIF
MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PENELITI



NARA SUMBER DARI TOKOH ADAT TAK KETINGGALAN



NARA SUMBER DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT
TURUT MEMBERI SUMBANGAN PEMIKIRANNYA



FOKUS GROUP DISKUTION (FGD)



JERO KARAMAN, "JERO KRAMA DESA LAN UMAT HINDU PIRENGANG BECIK-BECIK NGGIH. SAMPUNANG NGANGGEN KRIA UPAYA, DANA UPAYANE ANGGEN, BALIK SINURIAK. (GB.SEPTIARI DEWI)



JERO GURU (JERO KARAMAN), "JERO KRAMA DESA LAN UMAT HINDU PIRENGANG BECIK-BECIK NGGIH. MULA KLIKI MULA BIU, MULA ABEDIK MUPU LIU, BALIK SINURIAK". (GB.SEPTIARI DEWI)



“JERO KRAMA DESA LAN UMAT HINDU PIRENGANG
BECIK-BECIK NGGIH. BAAS BARAK BAAS PUTIH, SANE
DAAK DADI SUGIH, BALIK MASURIAK.
(GB.SEPTIARI DEWI)



JERO BARIS MENARIKAN TARI WALI
PERANG-PERANGAN (GB.SEPTIARI DEWI)



TARI WALI PERANG-PERANGAN (GB.SEPTIARI DEWI)



UPAKARA MATITI SUARA: BANTEN TAPAKAN
MASOROHAN (GB.SEPTIARI DEWI)



UPAKARA PAPANIAN: SEGEHAN AGUNG. (GB. SEPTIARI DEWI)



SEKAR URA BANTEN UPAKARA PEPRANIAN
MATITI SUARA. (GB: SEPTIARI DEWI)



Per
Je

ISBN 978-602-7961-04-3